

**DIPLOMASI PENETAPAN KONTRAKTOR BLOK CEPU
ANTARA INDONESIA - EXXONMOBIL
(NOVEMBER 2004 - MEI 2006)**

SKRIPSI

Fis HI 35/07

Cah
d



OLEH :

RYZA CAHAYA

NIM : 070316934

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2006/2007**



**DIPLOMASI PENETAPAN KONTRAKTOR BLOK CEPU
ANTARA INDONESIA – EXXONMOBIL
(NOVEMBER 2004 – MEI 2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



OLEH :

RYZA CAHAYA

NIM : 070316934

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2006/2007**

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Surabaya, 15 Juni 2007



Ryza Cahaya

NIM: 070316934

**DIPLOMASI PENETAPAN KONTRAKTOR BLOK CEPU
ANTARA INDONESIA - EXXONMOBIL
(NOVEMBER 2004 – MEI 2006)**

SKRIPSI

**Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
S1 dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP) pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Airlangga, Surabaya.**

Disusun oleh :

RYZA CAHAYA

NIM: 070316934

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2006/2007

PERSETUJUAN



**Setuju untuk diujikan
Surabaya, 15 Juni 2007**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilik Salamah', is written over the seal.

Dra. Lilik Salamah, MSi
(NIP 131569360)

LEMBAR PENGESAHAN

**Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji
pada tanggal 27 Juni 2007
pukul 10.00-12.00**

Ketua



(I Gde Wahyu Wicaksana SIP, MSi)

NIP: 139 050 635

Anggota 1:



(Drs. Djoko Sulistyono, MS)

NIP: 131453807

Anggota 2:



(Drs. Ajar Triharso MS)

NIP: 130289504

KATA PENGANTAR

Kedinamisan interaksi aktor dalam hubungan internasional antara negara bangsa dengan perusahaan multinasional menyebabkan perlunya pembahasan mengenai proses diplomasi kontemporer sebagaimana skripsi ini menelaah diplomasi Indonesia – ExxonMobil dalam penetapan kontraktor Blok Cepu. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan gambaran langkah dan pola diplomasi tersebut, berdasar pada konsep *state firm diplomacy* dan pola *multitrack diplomacy*.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu memberi rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selama proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit bantuan diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Seluruh staf pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya, khususnya:

- a. Ibu Dra. Lilik Salamah, Msi, selaku dosen pembimbing atas arahan dan motivasi selama penulisan skripsi ini
- b. Bapak Drs. I. Basis Susilo MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- c. Ibu Dra. B.L.S. Wahyu Wardhani MA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

d. Mas Moch. Yunus SIP, selaku dosen wali pengganti Dra. Sartika Soesilowati MA.

e. Drs. Djoko Sulisty, MS dan Mas I Gde Wahyu Wicaksana SIP, MSi, atas inspirasi pemikirannya.

2. Seluruh anggota keluarga atas cinta tulus dan doa yang tidak pernah putus.

3. Seluruh sahabatku atas dukungan kalian, *for all that worth it.*

4. Rekan-rekan angkatan 2003 atas semua kontribusi berharga kalian.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat.....	i
Halaman Judul Dalam (dengan maksud).....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	viii
Abstrak.....	ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5 Kerangka Pemikiran.....	9
I.5.1 <i>State Firm Diplomacy</i>	9
I.5.2 Pola Diplomasi.....	11
I.6 Argumen Penggambaran.....	14
I.7 Definisi Konseptual.....	14
I.7.1 Diplomasi.....	14
I.8 Tipe Penelitian.....	15
I.9 Ruang Lingkup Penelitian.....	16
I.10 Teknik Pengumpulan Data.....	17
I.11 Teknik Analisis Data.....	17
I.12 Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	PERAN PENTING BLOK CEPU BAGI INDONESIA – EXXONMOBIL.....	19
II.1	Kepentingan Indonesia terhadap Blok Cepu.....	19
II.1.1	Kepentingan Energi Bangsa Indonesia.....	19
II.1.2	Kepentingan Indonesia akan <i>Foreign Direct Investment</i>	25
II.2	Kepentingan ExxonMobil terhadap Blok Cepu.....	32
BAB III	DIPLOMASI INDONESIA - EXXONMOBIL.....	36
III.1	Identifikasi Masalah dalam Penetapan Kontraktor Blok Cepu.....	36
III.2	Langkah Upaya Diplomasi Indonesia – ExxonMobil dan Hasil Kesepakatan.....	38
III.2.1	Pola Diplomasi Indonesia.....	38
III.2.2	Pola Diplomasi ExxonMobil demi menyelesaikan permasalahan.....	63
III.3	Analisa Proses Diplomasi Indonesia – ExxonMobil.....	74
BAB IV	KESIMPULAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Impor Bahan Bakar Minyak.....	21
Tabel 2.2: Pertumbuhan investasi dan tingkat pengangguran.....	26
Tabel 2.3: Struktur Gross Domestic Product Indonesia.....	28
Tabel 2.4: Pekerja Pertambangan Indonesia.....	29
Tabel 2.5: Tingkat investasi eksplorasi Indonesia.....	30
Tabel 2.6: Sejarah Pemboran Lapangan Banyuurip.....	34
Tabel 3.1 Formulasi Pembagian Minyak KKS Blok Cepu.....	41
Tabel 3.2 Batasan dan Kondisi Kontrak Kerjasama Blok Cepu.....	44
Tabel 3.3 Struktur Organisasi pengelolaan Blok Cepu.....	53
Tabel 3.4: Pola Diplomasi Indonesia – ExxonMobil.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: <i>Multi-track Diplomacy</i>	12
Gambar 3.1 Pembentukan Tim Negosiasi.....	45
Gambar 3.2: Tawar menawar menuju <i>Joint Operating Agreement</i>	55
Gambar 3.3: Langkah Diplomasi ExxonMobil.....	73

ABSTRAK

Penetapan Kontraktor Blok Cepu merupakan bentuk diplomasi sebuah negara bangsa, Indonesia dengan perusahaan multinasional, ExxonMobil. Kepentingan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi, dalam hal ini minyak, dan juga kebutuhan akan investasi asing, membuat percepatan eksplorasi Blok Cepu menjadi penting. Sedangkan sebagai sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di industri minyak dan gas bumi, ExxonMobil memiliki kepentingan mendapatkan akses untuk memperoleh sumber faktor produksi, sehingga keberadaan Blok Cepu dengan kandungan minyak yang diperkirakan mencapai 600 juta barrel merupakan faktor yang amat penting.

Langkah dan pola diplomasi Indonesia – ExxonMobil dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, rentang waktu November 2004 hingga Mei 2006 merupakan rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini. Penentuan rentang waktu dalam penelitian ini didasarkan pada awal dimulainya kembali proses perundingan antara Indonesia dengan ExxonMobil hingga berakhirnya resistensi akan hasil kesepakatan dengan pembatalan pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi ditengah sedikitnya literatur mengenai diplomasi kontemporer antara negara bangsa dengan perusahaan multinasional.

Dalam proses diplomasi, kedua belah pihak mengupayakan upaya negosiasi untuk menyelesaikan kendala yang timbul. Indonesia menggunakan lima *track* dari sembilan *track* dalam *multitrack diplomacy*, yaitu pemerintah, bisnis, *activism*, kelompok non pemerintah atau kelompok ahli, penelitian pelatihan dan pendidikan. Sedangkan dalam pola diplomasi ExxonMobil, pemerintah Amerika Serikat sebagai *home country* ikut terlibat, bersama dengan *track* bisnis serta *track* media dan komunikasi.

Kata kunci: Indonesia, ExxonMobil, Diplomasi, Blok Cepu

BAB I

PENDAHULUAN

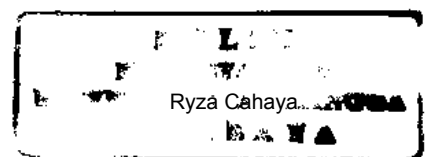
I.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tujuan utama dalam studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non negara dalam arena transaksi internasional.¹ Dengan demikian, pembahasan studi hubungan internasional akan bersifat dinamis mengikuti perkembangan sistem internasional itu sendiri. Salah satu perkembangannya, adalah adanya globalisasi yang menyebabkan pergeseran peran negara dalam dunia internasional kontemporer², dan keberadaan *Multinational Corporations* sebagai aktor baru, yang pada akhirnya turut merubah cara dan proses interaksi para aktor hubungan internasional.

Globalisasi merujuk pada semua proses yang menyatukan seluruh orang di dunia, ke dalam satu komunitas dunia, komunitas global. Pengaruh globalisasi berada pada semua aspek kehidupan sosial. Pengaruh globalisasi dalam studi hubungan internasional sendiri adalah sistem negara modern yang berakar pada prinsip *Westphalian states-system*, ditantang dengan adanya pengurangan kedaulatan negara. John Daniels menyatakan bahwa fenomena globalisasi sebagai dampak perkembangan pesat teknologi komunikasi, informatika, dan transportasi modern yang memunculkan fenomena berupa erosi terhadap kedaulatan nasional.

¹ Mas'ood, Mochtar. (1993). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Jakarta. hal. 32.

² Jackson, Robert, (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasiona..* terj. Pustaka Pelajar. Jakarta. hal. 40



Secara teoritis, kedaulatan merupakan legitimasi fungsi internal dan eksternal dari negara. Namun, dengan adanya globalisasi, maka otoritas, dan yurisdiksi negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, politik, hukum, dan kebijakan fundamental, akan sangat mempertimbangkan rekomendasi ataupun kondisi eksternal.³

Björn Hettne, secara empiris melihat bahwa globalisasi mempunyai relevansi yang erat dengan perubahan struktur ekonomi dunia.⁴ Dari sisi ekonomi, McChesney menyatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses dimana kapitalisme meningkat secara transnasional, tidak hanya dalam perdagangan barang dan jasa, tetapi yang lebih penting, pada aliran modal dan perdagangan mata uang dan instrumen finansial.⁵ Milton Friedman menyatakan bahwa globalisasi berarti kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu produk di mana pun, menggunakan sumber daya dari mana pun, oleh perusahaan yang berlokasi di mana pun, untuk dijual di mana pun.

Terdapat empat dimensi perubahan globalisasi, yang pertama adalah peningkatan kedekatan aktifitas sosial, politik, dan ekonomi, lintas negara, wilayah, dan benua. Dimensi yang kedua adalah adanya intensifikasi atau pertumbuhan pesat akan *interconnectedness* dalam hal perdagangan, investasi, keuangan, migrasi, budaya, dan sebagainya. Dimensi yang ketiga adalah dikarenakan adanya pertumbuhan intensitas dan ekstensitas dari *global*

³ Suherman, Ade. (2002). *Organisasi internasional dan integrasi ekonomi regional*, Ghalia Indonesia. Bandung. Hal.22

⁴ Pareira, Andre. (1999). *Negara dalam studi hubungan internasional: Perubahan dan Kesinambungan*, dalam buku *Perubahan Global dan perkembangan studi hubungan internasional*. Parahyanan Centre for International Studies. Bandung. hal.112

⁵ Suherman. *loc.cit*,

interconnectedness, maka hal ini menimbulkan dampak akan adanya percepatan interaksi global, seiring dengan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi penyebaran ide, barang, informasi, modal, dan manusia. Dimensi yang terakhir dari globalisasi adalah semakin samar – samarnya batas antara permasalahan domestik dengan permasalahan global menyebabkan sebuah permasalahan yang terjadi di suatu negara dapat berdampak bagi wilayah di negara lain.⁶

Salah satu aktor yang berkembang pesat dalam globalisasi adalah *Multinational Corporations* atau perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah sebuah organisasi yang mencari keuntungan, dan memiliki aset, setidaknya di dua negara, yaitu *home state*, yaitu negara tempatnya berdiri, dan *host state*, negara yang menjadi cabang.⁷ Perkembangan perusahaan multinasional sangat pesat, dari sekitar 3.500 pada tahun 1960, menjadi sebanyak 60.000 pada tahun 1999.⁸ Hal ini juga diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990, kekuatan perusahaan multinasional setara dengan 3,5 % Gross Domestic Product dunia, yang meningkat hingga 4,3 % di tahun 2000.⁹ Sepuluh tahun lalu, Raghavan menandakan, dua pertiga ekonomi dunia dikontrol perusahaan multinasional. Anderson dan Cavanagh menemukan, 100 entitas ekonomi terbesar di dunia terdiri dari 51 perusahaan multinasional (dilihat dari sales-nya) dan 49 negara (dari GDP-nya). Berdasar World Investment

⁶ PDF Ritva Kivikkokangas, Lecture course on Globalisation from global and local perspectives, Sandgren, Spring 2005

⁷ Evans, Graham. Multinational Corporations, *The Penguin Dictionary of International Relations*, page 332

⁸ Smith, Steve. *The Globalization of World Politics*, page. 524

⁹ www.cafod.org

Report 2004-2005, kekuatan ekonomi korporasi tumbuh kian besar, melebihi pertumbuhan GDP negara. Total sales 10 korporasi terbesar tahun 2003 telah melebihi total GDP negara Amerika Latin dan Karibia yang menciut menjadi 1,799,549 juta dollar AS.¹⁰

Aktifitas perusahaan multinasional untuk membuka cabang disebut sebagai *foreign direct investment*, atau investasi asing langsung. Salah satu bentuknya adalah investasi asing langsung yang bertujuan mencari sumber faktor produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan faktor produksi yang tersedia di negara asal perusahaan multinasional tersebut. Dalam beberapa kasus, sumber tersebut sangat terbatas di *home country*, seperti upah buruh yang murah dan sumber daya alam. Bentuk investasi asing langsung macam ini banyak terjadi di negara sedang berkembang. Lebih dari 75% investasi di negara sedang berkembang, berasal dari sektor privat, yang kebanyakan merupakan perusahaan besar.¹¹

Keadaan ini menimbulkan sebuah hubungan timbal balik antara negara sedang berkembang dengan perusahaan multinasional. Di satu sisi, perusahaan multinasional membutuhkan sumber faktor produksi yang lebih efisien, sedangkan negara sedang berkembang membutuhkan kehadiran perusahaan multinasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi asing langsung dapat membuka lapangan kerja yang dapat menurunkan angka pengangguran, dan juga mengembangkan perekonomian nasional melalui transfer

¹⁰ Aloysius Gunadi Brata. *Sumber Kuasa Korporasi*. www.kompas.co.id. Senin 20 Maret 2006

¹¹ *Foreign Direct Investment*, United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org

teknologi.¹² Dengan begitu, terdapat pola interaksi yang berubah dalam hubungan internasional, dimana negara tidak saja berdiplomasi antar negara, tetapi juga dengan perusahaan. Negara saat ini harus bernegosiasi langsung dengan perusahaan multinasional, dikarenakan adanya erosi peran negara saat perekonomian nasional tidak dapat bertahan tanpa perdagangan internasional.¹³

Di Indonesia sendiri, pada abad ke-17, sebuah perusahaan multinasional dari Belanda yang didukung oleh tentara kerajaan Belanda, bernama VOC atau Vereenigde Oostindische Compagnie memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia untuk diekspor ke pasar Eropa. Kekayaan sumber daya alam Indonesia mengundang berbagai perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya, dalam hal ini industri perminyakan menjadi lahan yang sangat diminati. Industri perminyakan di Indonesia dimulai pada tahun 1885 dengan penemuan Lapangan Telaga Said di Sumatera Utara, diikuti penemuan di Ledok Jawa Timur, Muara Enim di Sumatera Utara, dan Sanga-sanga di Kalimantan Timur. Pada saat itu, pemegang konsesi akan mendapatkan hak untuk menambang sumber-sumber mineral pada area yang ditentukan sebagai konsesi, kemudian mempunyai kontrol langsung pada sumber-sumber tersebut. Pada 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaan, dan menyatakan bahwa semua kekayaan alam termasuk sumber-sumber minyak adalah milik rakyat Indonesia, sehingga semua kegiatan

¹² Dunning, J. H, *Multinational enterprises and the global economy*, Wokingham, England ; Reading, Mass, Addison-Wesley, 1993, hal 115

¹³ Susan Strange, "The Erosion of the State", *Current History*, vol. 96, November 1997, hal 4

eksplorasi dan eksploitasi harus dikontrol, dan memberikan keuntungan maksimum bagi rakyat Indonesia.¹⁴

Keunggulan sumber daya alam Indonesia, dapat terlihat jelas di Blok Cepu, yang memiliki kandungan sumber daya minyak bumi sekitar 600 juta barel dan sumber daya gas bumi sekitar 1,7 triliun kaki kubik. Blok Cepu sendiri terdiri atas beberapa lapangan, antara lain Banyu Urip, Alas Dara, Kemuning, Jambaran, Sukowati, dan Cendana. Diperkirakan Blok Cepu dapat menambah produksi minyak hingga 165 ribu barel per hari, dan produksi puncaknya akan menambah kapasitas produksi minyak mentah Indonesia saat ini hingga 20%. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan atas beroperasinya Blok Cepu, mengingat adanya permasalahan energi nasional yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia saat itu. Produksi minyak di Indonesia terus menurun, dari 1,7 mbq di tahun 1980-an, menjadi kurang dari 1 juta di tahun 2006. Sementara itu, konsumsi dalam negeri terus naik, sehingga dari net-exporter minyak, Indonesia menjadi net-importer.¹⁵

Blok Cepu, yang sebelumnya hak pengelolaannya dimiliki oleh PT. Humpuss Petrama Gas, bulan Juni 2000 beralih menjadi milik ExxonMobil, sebuah perusahaan multinasional minyak yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan begitu, ExxonMobil memiliki hak atas *Technical Assistance Contract* di Blok Cepu bersama dengan Pertamina hingga 2010. Di era Presiden Megawati,

¹⁴ *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta & sekitarnya, Rabu, 26 April 2006 Universitas Indonesia, hal.1

¹⁵ Prof. Dr. Subroto. *Diplomasi Energi Indonesia dengan negara-negara kawasan Afrika Sub Sahara: Tinjauan kritis terhadap manjaunya bagi kepentingan nasional*

perundingan Cepu dihidupkan ketika ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak hingga 2030, dengan ditemukannya cadangan minyak baru. Saat itu, Menteri BUMN Laksamana Sukardi menyatakan bahwa Cepu belum tentu diserahkan ke ExxonMobil dan terbuka kemungkinan masuknya investor baru, termasuk PetroChina, sebuah perusahaan multinasional minyak yang berasal dari Republik Rakyat Cina. Kejelasan akan penetapan kontraktor Blok Cepu mulai mendapatkan titik terang, di masa akhir pemerintahan Presiden Megawati, saat Pertamina dan ExxonMobil menandatangani *Head of Agreement* pada bulan Juni 2004 untuk membicarakan kelanjutan kontrak kontraktor di Blok Cepu.¹⁶ Namun, sejak itu tidak ada lagi tindak lanjut Direksi Pertamina untuk berunding dengan pihak ExxonMobil sebagai pemegang *Technical Assistance Contract*.

Baru di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadilah serangkaian langkah diplomasi dengan pihak ExxonMobil yang membicarakan kelanjutan kontrak kontraktor di Blok Cepu. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Maret 2006 ditetapkanlah kontraktor Blok Cepu, dengan ExxonMobil sebagai *general manager*, dan Pertamina sebagai ketua Joint Operating Committee.¹⁷

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menelusuri tentang gambaran langkah diplomasi antara Indonesia – ExxonMobil, dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, rentang waktu November 2004 – Mei

¹⁶ Jawapos, *Sumur Cepu Disoal Dijual Pertamina ke ExxonMobil*, 16 Maret 2006

¹⁷ www.exxonmobil.com, *ExxonMobil and Pertamina Sign Joint Operating Agreement for Cepu Block*, 15 Maret 2006

2006, sehingga kita akan mengetahui dengan lebih jelas mengenai interaksi diplomasi yang terjadi, khususnya pada rentang waktu yang telah ditentukan.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja langkah diplomasi antara Indonesia – ExxonMobil dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, November 2004 – Mei 2006?
2. Bagaimana pola diplomasi Indonesia - ExxonMobil dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, November 2004 – Mei 2006?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah riset empirik yang mendeskripsikan tentang diplomasi yang terjadi dalam penetapan kontraktor Blok Cepu antara Indonesia – ExxonMobil, rentang waktu November 2004 – Mei 2006. Sebelumnya, telah terdapat penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus Blok Cepu, dengan penekanan bahasan yang beragam. Sebagai contoh, penelitian dari sudut pandang hukum, adalah penelitian yang dilakukan oleh Teddy Anggoro yang berjudul *Kajian Kritis Terhadap Permasalahan Hukum yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (Studi Kasus ExxonMobil Oil Indonesia sebagai Lead Operator Blok Cepu)*¹⁸. Selain itu, ada juga referensi yang membahas permasalahan Blok Cepu dari sisi dampak investasi ExxonMobil terhadap perekonomian Indonesia, oleh Arief Anshory Yusuf, yang berjudul *Investasi*

¹⁸ http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=71, diakses 2 Februari 2007

Exxon dan Kutukan Sumber Daya Alam¹⁹. Berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja langkah diplomasi antara Indonesia – ExxonMobil, sehingga didapatkan gambaran mengenai pola diplomasi Indonesia – ExxonMobil, dalam penentuan kontraktor Blok Cepu, pada rentang waktu November 2004 – Mei 2006.

1.4 Manfaat Penelitian

Urgensi penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi bagi peminat studi diplomasi, mengingat masih belum banyak tulisan – tulisan ilmiah yang mengupas tentang diplomasi kontemporer antara negara dengan perusahaan multinasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *States Firms Diplomacy*

Dalam tulisannya *States, Firms, and Diplomacy*, Susan Strange menyatakan keberadaan pola diplomasi baru antara negara dengan perusahaan multinasional, yang saling memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing melalui serangkaian proses tawar menawar. Hal ini didasari oleh adanya perubahan struktur keuangan internasional seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Perusahaan besar akan mencari daerah baru, baik untuk mencari sumber faktor produksi yang lebih efisien, ataupun sebagai tempat pemasaran

¹⁹ www.pikiran-rakyat.co.id, edisi Jumat 7 April 2006

produknya. Pengaruh lainnya juga muncul dikarenakan liberalisasi keuangan internasional yang menghilangkan halangan bagi mobilitas kapital.²⁰

Dengan begitu, kompetisi antar negara untuk mendapatkan *market shares*, memaksa negara untuk berdiplomasi dengan perusahaan asing agar perusahaan asing melokasikan operasi mereka dalam wilayah negara tersebut. Selain itu, perusahaan multinasional sendiri juga bersaing dengan perusahaan multinasional lain, yang berada dalam bidang yang sama, dalam memperoleh ijin untuk membuka cabang di suatu negara. Terjadilah proses tawar-menawar yang tertuang dalam berbagai kebijakan untuk mendapatkan tujuan masing – masing pihak. Keunggulan perusahaan multinasional dalam hal modal dan teknologi menjadi kekuatan tawar, sedangkan negara menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin bagi perusahaan multinasional untuk beroperasi di wilayahnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan negara dalam hubungannya dengan perusahaan multinasional adalah melalui pembuatan kebijakan yang dapat memberikan nilai lebih untuk menarik investasi asing langsung, antara lain negara akan berusaha menunjukkan kredibilitas dan komitmen institusi politik untuk memperlancar proses investasi.²¹ Sedangkan langkah diplomasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan yang berkuasa. Hal ini dilakukan tidak hanya pada *host country* negara mendekati pemerintah demi mempermudah perolehan ijin beroperasi,

²⁰ PDF Susan Strange. "States, Firms, and Diplomacy." This is an edited text of an article which first appeared in *International Affairs*. London, Vol. 68, no. 1 January 1992, pp. 1-15, and is reproduced with permission

²¹ Nathan M. Jensen. *Nation-States and the Multinational Corporation: A Political Economy of Foreign Direct Investment*, Princeton University Press, 2006

tetapi juga pada *home country*, dimana perusahaan multinasional menggunakan strategi diplomasi agar kebijakan pemerintah dapat menguntungkan mereka, baik yang terkait dengan ketentuan investasi ataupun dalam permasalahan pencarian sumber faktor produksi. Selain itu, perusahaan multinasional juga melakukan langkah diplomasi dalam hal menciptakan citra baik perusahaan untuk memperoleh pasar yang luas.²²

1.5.2 Pola Diplomasi

Perkembangan struktur sistem internasional turut mempengaruhi keragaman pola diplomasi. Pola diplomasi merupakan gambaran bentuk proses diplomasi. Dalam hal ini, pola diplomasi dapat berbentuk:

- a. Diplomasi bilateral antar dua negara, berbentuk formal dan dilakukan oleh diplomat profesional.²³
- b. Diplomasi multilateral melibatkan lebih dari dua negara, yang biasanya dilakukan melalui *intergovernmental organizations*, seperti dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁴
- c. *Multi-track Diplomacy* merupakan sebuah pola diplomasi, yang melibatkan penggunaan *track - track* yang berpengaruh dalam proses pemecahan masalah. Fungsi dari *multi-track diplomacy* adalah untuk menghadapi kompleksitas permasalahan diperlukan sinergi dari beberapa *track* sebagai metode efektif untuk menyelesaikan perbedaan,

²² PDF Pedro Conceição Parreira, *Some considerations about the state of the art of the "new economic diplomacy"*

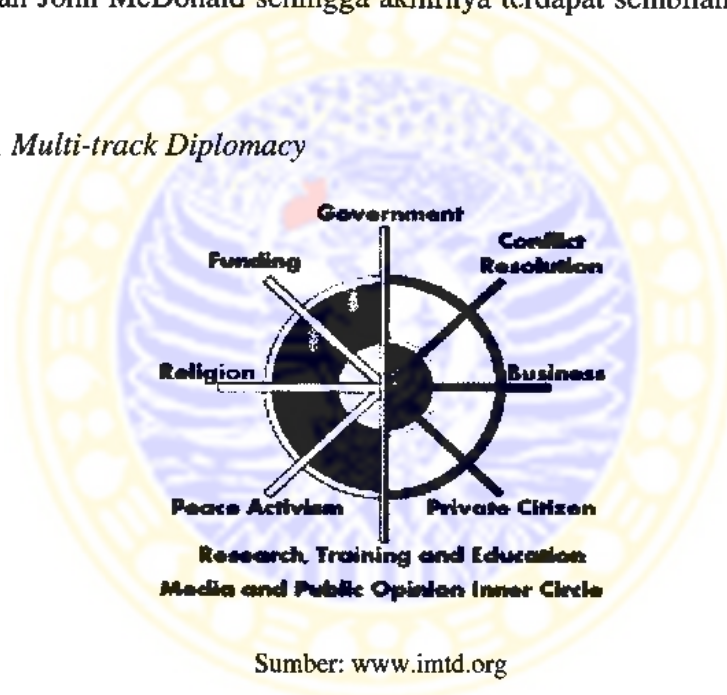
²³ Brian White, *Diplomacy, The Globalization of World Politics*, John Baylis and Steve Smith, page.321

²⁴ White, *loc.cit*

konflik, sehingga kerjasama internasional dapat terjadi. Berdasar permasalahan penelitian ini, maka pola *multi-track diplomacy* merupakan pola yang dapat menggambarkan kompleksitas langkah diplomasi Indonesia - ExxonMobil.

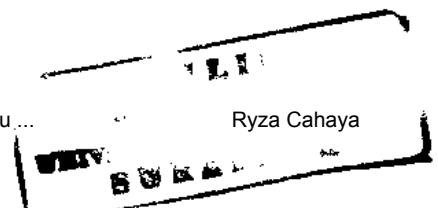
Pada tahun 1981, Joseph Montville merumuskan pola diplomasi yang terdiri dari pihak pemerintah sebagai *track* pertama, dan kelompok ahli non – pemerintah sebagai *track* kedua. Metode ini kemudian dikembangkan oleh Louise Diamond dan John McDonald sehingga akhirnya terdapat sembilan *track* sebagai berikut²⁵ :

Gambar 1.1 *Multi-track Diplomacy*



- *Track* Pemerintah: Merupakan proses diplomasi resmi, pembuatan kebijakan melalui aspek formal pemerintahan.

²⁵ Dr. Louise Diamond and Ambassador John McDonald, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, Kumarian Press, 1996, www.imtd.org



- *Track* Non – pemerintah/ Kelompok ahli: Adanya keterlibatan kelompok ahli non – pemerintah untuk menganalisa, mencegah, mengatur, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- *Track* Bisnis: Keterlibatan kelompok bisnis untuk menciptakan jalur komunikasi informal melalui kesempatan kerjasama ekonomi.
- *Track* Warga Negara: Keterlibatan warga negara sebagai individu yang melakukan diplomasi melalui organisasi swasta dan kelompok kepentingan.
- *Track* Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan: Adanya proses pembelajaran mengenai studi global dan resolusi konflik.
- *Track* Activism: Adanya pengawasan advokasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal hak asasi manusia, dan keadilan sosial ekonomi.
- *Track* Komunitas Agama: Pendekatan dari komunitas agama yang memiliki nilai – nilai kedamaian dan non – kekerasan.
- *Track* Pendanaan: Merupakan kelompok yang menyediakan sumber dana untuk mendukung aktifitas diplomasi yang dilakukan oleh *track* lain.
- *Track* Media dan Komunikasi: Adanya peran informasi dari media (media cetak, televisi, video, radio, system elektronik) yang akhirnya membentuk opini publik.

Kesembilan *track* berada dalam tatanan yang sama dalam satu lingkaran yang saling berhubungan dan beroperasi bersama sebagai sebuah sistem yang utuh. Hal ini dikarenakan, walaupun setiap *track* memiliki sumber, nilai, dan cara pendekatan sendiri, tetapi terdapat banyak kejadian dimana terjadi *overlapping*,

kolaborasi, dan saling melengkapi antar *track*, walaupun tidak selalu terdapat keterlibatan semua *track* terlibat dalam sebuah proses diplomasi.

I.6 Argumen Penggambaran

Ada empat hal yang menjadi argumen utama dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini bersifat deskriptif karena tidak bertujuan untuk memecahkan masalah dan tidak bertujuan menguji hipotesis.
2. Dalam proses penetapan kontraktor Blok Cepu, November 2004 - Mei 2006, terjadi berbagai langkah diplomasi.
3. Langkah diplomasi merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia – ExxonMobil untuk mengejar kepentingan mereka masing-masing.
4. Pola diplomasi Indonesia – ExxonMobil dilihat dari interaksi *track* berdasar *multi-track diplomacy*.

I.7 Definisi Konseptual

I.7.1 Diplomasi

Dari perspektif mikro, pengertian diplomasi dijelaskan melalui tingkah laku para aktor dalam sistem global, sehingga diplomasi lebih dilihat sebagai sebuah instrumen kebijakan, untuk mencapai tujuan aktor tersebut, saat berhubungan dengan aktor lain.²⁶ Selain itu, diplomasi juga dapat diartikan

²⁶ White, *op.cit.*, page.318

sebagai sebuah mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi, dalam hubungan bisnis antara negara dan aktor internasional lain.²⁷

I.8 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif²⁸, karena penelitian ini mendeskripsikan, melaporkan atau menggambarkan diplomasi Indonesia – ExxonMobil. Selain itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan suatu pengujian hipotesis.

I.9 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah bulan November 2004 sampai dengan Mei 2006. Rentang waktu tersebut dipilih sebagai ruang lingkup penelitian karena bulan November 2004 merupakan saat dimulainya kembali perundingan Blok Cepu, melalui arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah sebelumnya sempat terhenti setelah penandatanganan *Head of Agreement* antara Pertamina – ExxonMobil di bulan Juni 2004.²⁹ Hal ini menyebabkan dimulainya lagi proses interaksi diplomasi antara Indonesia- ExxonMobil. Sedangkan Bulan Mei 2006 dipilih sebagai pembatas berakhirnya diplomasi dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, dengan adanya pembatalan pengajuan angket DPR, yang menandakan teredamnya resistensi akan penandatanganan Joint Operating Agreement yang memberikan hak operator utama Blok Cepu kepada ExxonMobil. Fokus utama

²⁷ Melissen, J, *Innovation in Diplomatic Practice*, Macmillian Press:Basingstoke, 1999

²⁸ Mas'ood, Mochtar, 1990 Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, hal 79

²⁹ Menko Perekonomian mengeluarkan surat No: S-54/M.EKON/11/2004 kepada Dirut Pertamina, menyatakan adanya arahan Presiden untuk memulai kembali perundingan Blok Cepu dan menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

penelitian ini memang terpusat pada periode dua tahun tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan ada fenomena-fenomena dan data – data diluar rentang waktu tersebut yang turut menjadi bahasan dalam penelitian ini, selama memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

I.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka³⁰ dengan menelusuri dan mencari informasi atau data melalui:

1. Buku-buku.
2. Kamus.
3. Artikel – artikel dan makalah yang terdapat di koran, majalah berita, ataupun artikel dan makalah yang diakses melalui internet.
4. Situs – situs resmi pemerintah dan juga situs perusahaan multinasional yang diakses melalui internet.
5. Data seminar-seminar
6. Hasil penelitian - penelitian terdahulu.

I.11 Teknik Analisis Data Kualitatif

Dalam menganalisis fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap data-data yang ada dengan menggunakan penjelasan berupa kata-kata untuk memperoleh sejumlah kecenderungan yang disimpulkan sebagai hasil penelitian, atau dengan kata lain

³⁰ Paridjata Westra, *Pedoman Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian Empiris di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Airlangga University Press, Jakarta, 2001, hal.3

teknik analisis datanya bersifat kualitatif.³¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dapat dilakukan terhadap data baik kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka statistik. Terhadap data kuantitatif, analisis ini dilakukan untuk menerangkan kejelasan dari angka-angka atau membandingkan beberapa gambaran sehingga diperoleh gambaran baru.

I.12 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis yang secara keseluruhan terbagi menjadi empat bab. Masing – masing bab memiliki substansi sebagai berikut:

-Bab I merupakan bab pendahuluan yang memiliki tiga belas sub-bab dan menjadi petunjuk tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab pembuka ini, dikemukakan latar belakang permasalahan yang menjadi permasalahan penelitian, rumusan permasalahan yang ingin di jawab, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argumen penggambaran, konseptualisasi variabel, operasionalisasi variabel, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga sistematika penulisan. Kesemuanya merupakan bagian yang sangat krusial untuk dapat melaksanakan penelitian ini.

³¹ Singarimbun, Masry dan Sofian Effendi (ed) 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta., hal 57

-Bab II terdiri atas dua sub-bab yang membahas mengenai peran penting Blok Cepu, dilihat dari kepentingan Indonesia dan juga kepentingan ExxonMobil terhadap keberadaan Blok Cepu.

-Bab III berisi uraian mengenai langkah diplomasi apa saja yang terjadi antara Indonesia – ExxonMobil dalam rentang waktu November 2004 – Mei 2006

-Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan



II.1 Kepentingan Indonesia terhadap Blok Cepu**II.1.1 Kebutuhan Energi Bangsa Indonesia**

Dalam pandangan kebijakan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi merupakan salah satu penopang utama bagi perkembangan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi dibagi ke dalam empat bidang, yaitu sumber pendapatan negara, sarana pertumbuhan, sumber energi dan bahan baku industri, dan menciptakan efek multiplier. Penopang utama bagi keempat bidang tersebut adalah ketersediaan energi.³² Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sasaran dalam pembangunan bidang pertambangan dan sumber daya mineral sebagai berikut:

1. Meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas
2. Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
3. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Salah satu sumber³³ energi krusial yang menopang pembangunan nasional Indonesia, adalah minyak dan gas. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 negara produsen minyak yang berhimpun dalam *The Organization of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Berdasar *British Petroleum Statistical Review of World Energy 2004*, disebutkan bahwa produksi minyak Indonesia telah mengalami penurunan sebanyak 8,6 persen dari 1,288 juta barrel per hari pada

³² Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Kerja Sama Energi dengan Negara-negara Afrika Sub-Sahara: Manfaat Jangka Panjang bagi kepentingan nasional Indonesia*, Surabaya 26-27 April 2007

tahun 2002 menjadi 1,179 juta bph pada tahun 2003. Padahal, konsumsi BBM di dalam negeri pada tahun yang sama meningkat 1,5 persen dari 1,115 bph menjadi 1,131 bph pada tahun 2004.³⁴ Dikarenakan tingginya konsumsi masyarakat Indonesia, maka ketersediaan cadangan minyak nasional menjadi suatu hal yang krusial. Cadangan minyak paling besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia adalah pada tahun 1974 (sebesar 15,000 MB), kemudian menurun secara gradual sampai dengan tahun 1988 (9,000 MB) dan mengalami penurunan drastis pada tahun 1989 (5,114 MB). Mencermati OPEC Annual Statistic Bulletin 2005, Indonesia hanya memiliki cadangan minyak (*proven oil reserves*) pada tahun 2005 sekitar 4,301 metrik barrel (MB) atau sekitar 0,47% dari cadangan seluruh anggota OPEC atau sama dengan 0,37% dari cadangan seluruh dunia. Nilai ini jauh dibawah cadangan minyak terbukti kesepuluh negara anggota OPEC lainnya yang diatas 35,000 MB (kecuali Algeria sekitar 12,270 MB dan Qatar 15,207 MB). Potensi penemuan sumber-sumber minyak baru pun masih belum menggembirakan disamping hambatan biaya penyediaan teknologi yang sangat tinggi sejalan dengan sulitnya lokasi eksplorasi dan eksploitasi. Penurunan jumlah produksi yang secara gradual berlangsung selama lebih kurang enam tahun belakangan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu sumur-sumur yang sudah tua (*mature wells*) sementara ketersediaan teknologi untuk proses eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak baru masih belum memadai dan alasan kesulitan lokasi geografis sumber minyak (misalnya area *frontier daring deep water*).

Keterbatasan pasokan minyak membuat Indonesia terpaksa harus mengimpor guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Mulai tahun 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak mentah dunia, dengan adanya defisit

³⁴ Buyung Wijaya Kusuma, Jangan Panik! Produksi minyak Indonesia turun dan impor naik, Kamis, 8 Juli 2004, Kompas

sebesar antara 49,3 ribu barrel/hari (jumlah produksi perhari = 1.094,4 ribu barrel dan konsumsi 1.143,7 ribu barrel). Bahkan, pada tahun 2005 dan 2006, impor minyak bumi terus bertambah sebagaimana terlihat di bawah ini.³⁵

Tabel 2.1 Impor Bahan Bakar Minyak

IMPOR BBM
(Dalam Satuan Barrel)

Bulan	2005	2006
Januari	13.637.251	8.363.800
Februari	9.996.218	7.472.400
Maret	12.799.371	6.809.900
April	11.400.451	7.533.000
Mei	9.304.022	10.639.200
Juni	10.020.923	15.148.000
Juli	15.551.492	11.525.800
Agustus	18.628.665	10.809.700
September	17.355.559	11.802.000
Oktober	15.309.572	12.130.300
November	11.654.472	
Desember	14.048.415	
Total	160.117.812	102.232.100

Sumber : Ditjen Migas

Impor minyak inilah yang memberatkan laju perekonomian nasional terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia. Bagi perekonomian terbuka skala kecil seperti Indonesia, fluktuasi harga minyak dunia telah berakibat langsung bagi efektivitas kebijakan fiskal yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak dunia memberikan tekanan khususnya pada anggaran subsidi BBM. Pada tahun 2003, pemerintah menghapus subsidi BBM, terkecuali untuk minyak tanah bagi rumah tangga, sekaligus meluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Pada bulan Oktober 2005, pemerintah Indonesia memotong subsidi BBM dikarenakan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, hingga mencapai USD 14 juta. Namun, keputusan

³⁵ PDF Impor BBM 2006 baru, www.mesdm.net, diakses tanggal 20 Mei 2007

ini malah membuat harga BBM naik dan menyebabkan inflasi meningkat sampai 17% di bulan Januari 2006. Sebenarnya APBN 2004 sudah goyah ketika harga minyak mentah sempat bertahan di atas 40 dollar AS per barrel. Disebabkan, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dollar AS dari target APBN yang hanya 22 dollar AS, memaksa pemerintah menambah subsidi harga BBM Rp 2 triliun dan berakibat defisit Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar. Hans Vriens, konsultan perusahaan minyak dan gas, Apco Indonesia, menyatakan bahwa terdapat sebuah ironi melihat keadaan Indonesia yang mengimpor minyak, walaupun terdapat banyak sumber minyak bumi dan gas, tetapi tidak dapat dieksplorasi dikarenakan keterbatasan modal dan teknologi.³⁶ Oleh karena itulah, keberadaan Blok Cepu membuat pemerintah Indonesia sangat berkepentingan untuk mengamankan ketersediaan energi nasional. Pada wawancara tanggal 12 Februari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menjadikan pembangunan industri minyak dan gas sebagai prioritas agenda pembangunan nasional, termasuk usaha eksplorasi sumber minyak bumi dan gas yang berada di Blok Cepu.³⁷

Blok Cepu merupakan daerah dalam cekungan Jawa Timur Laut yang termasuk salah satu mandala penghasil migas tertua di dunia dengan dimulainya produksi di tahun 1887, antara lain dari ladang Kuti dan Kruka di selatan Surabaya. Sebelum Perang Dunia ke II daerah ini dikuasai Shell BPM yang kemudian berganti nama menjadi PT Shell Indonesia. Pada tahun 1960, Blok Cepu diambil alih PN Permigas, dan pada tahun 1965 diambil alih oleh Lemigas untuk tujuan pendidikan sebagai daerah latihan untuk personel teknik perminyakan, hingga Pertamina Unit III mengambil alih Blok Cepu pada tahun 1980. Pada 23 Januari 1990, ditandatangani perjanjian *Technical Assistance Contract* dengan PT Humpus

³⁶ Grace Nirang and Clare Leow, Indonesia may become an oil importer as output slides, Energy Bulletin, 13 April 2005

³⁷ Nirang. *ibid*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Patragas, setelah keluar dekret pemerintah yang mengizinkan perusahaan nasional berpartisipasi dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Dikarenakan masalah keuangan, PT Humpus Patragas memutuskan untuk menjual 49% sahamnya seharga USD 100 juta pada bulan Mei 1996 kepada Ampolex, sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Australia. Posisi operator tetap dipegang oleh PT Humpus Patragas, dan Ampolex hanya menempatkan Vice President Exploration dan Chief Geologist di dalam organisasi PT Humpus Patragas.³⁸ Ampolex kemudian diakuisisi oleh Mobil Oil pada bulan Desember 1996, sehingga otomatis Mobil Oil memiliki saham di Blok Cepu sebesar 49%. Pada bulan Agustus 1998, Mobil Oil memulai pemboran eksplorasi Banyu Urip-01. Pada tahun 1999, Mobil Oil *merger* dengan Exxon, dan membentuk perusahaan ExxonMobil. Pada Juni 2000, Mobil Cepu Ltd, anak perusahaan ExxonMobil memperoleh sisa 51 % *interest* kontraktor milik PT Humpus Patragas dan mengambil alih hak sebagai operator untuk *Technical Assistance Contract* Cepu hingga tahun 2010.

Perut bumi di kawasan hutan jati wilayah Cepu-Bojonegoro, Provinsi Jawa Tengah ini masih mengandung minimal 250 juta barrel minyak bumi dan sekitar belasan triliun kaki kubik gas bumi walau sejak lebih dari 100 tahun terakhir telah ratusan juta barrel minyak disedot dari perut Cepu. Sedangkan Lapangan Banyu Urip, di Cepu, memiliki cadangan migas dengan potensi produksi sekitar 150.000 barrel per harinya.³⁹ Bahkan jika dikelola dengan baik, blok Cepu diperkirakan dapat menghasilkan minyak sekitar 20% kapasitas produksi nasional.⁴⁰ Hal ini

³⁸ SEJARAH EXPLORASI DAERAH MIGAS CEPU SAMPAI DIKETEMUKANNYA LADANG MINYAK BANYU URIP oleh R.P. Koesoemadinata, dari PRAKTEK KULIAH LAPANGAN MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO DALAM KERJASAMA EXPLORASI MINYAK BUMI ANTARA INDONESIA (PERTAMINA) DENGAN EXXON MOBILE, Mahasiswa FISIP UNAIR Juni 2006

³⁹ Indroyono Soesilo, Mencari Migas Semakin Canggih, Kompas 24 Oktober 2005

⁴⁰ Rizal Malarangeng, Blok Cepu, Mission Accomplished, TEMPO 05/XXXV/27 Maret - 2 April 2006

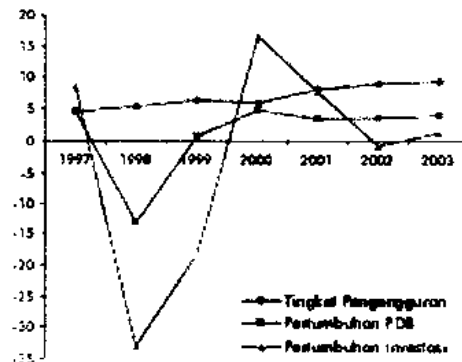
menyebabkan pemerintah Indonesia berkepentingan untuk sesegera mungkin melaksanakan produksi eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan membantu kelancaran pembangunan nasional.

II.1.2 Kepentingan Indonesia akan *Foreign Direct Investment*

Sejak awal tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri. Sayangnya, krisis keuangan pada tahun 1997-1998, telah memperlemah sistem keuangan dan pemerintahan (governance) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis dan berpengaruh pada kegiatan perekonomian secara umum. Sebagai gambaran, tingkat investasi sekarang hanya sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%. Pertumbuhan ekonomi sekitar 3-4% dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus meningkat.

Keterkaitan antara pertumbuhan investasi dan tingkat pengangguran dapat
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Pertumbuhan Investasi dan Tingkat Pengangguran



Sumber: Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank.

Dengan begitu, keberadaan investasi asing menjadi sangatlah penting. Kehadiran investasi asing memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, sebagai berikut⁴¹:

1. Stimulasi bagi perekonomian nasional

Investasi asing langsung berkontribusi pada Gross Domestic Product, Gross Fixed Capital Formation, keseimbangan neraca pembayaran. Selain itu, investasi asing langsung menstimulasi pasar ekspor dan menambah penerimaan nilai tukar uang. Walaupun begitu, hal ini juga bergantung pada kemampuan negara mengatur investasi asing, dan tingkat investasi domestic.

2. Stabilitas investasi asing langsung.

Investasi asing langsung memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber investasi lain, semacam investasi portfolio dan pinjaman. Namun, bila

⁴¹ PDF, Foreign Direct Investment: A Lead Driver for Sustainable Development?, Towards Earth Summit 2002 Economic Briefing Series No. 1, <http://www.earthsummit2002.org>

perdagangan internasional sedang mengalami kelesuan dalam waktu yang cukup lama, maka stabilitas ini juga akan berkurang.

3. Pembangunan Sektor Sosial

Dengan adanya investasi asing langsung, kesempatan kerja semakin terbuka, pengangguran menurun, dan memberikan kesejahteraan bagi populasi yang berada di sekitar wilayah investasi.

4. Pembangunan infrastruktur dan transfer teknologi

Pembangunan infrastruktur dan adanya pembelajaran teknologi pada masyarakat local, merupakan dampak positif lain dari keberadaan investasi asing langsung.

Untuk mengoptimalkan semua manfaat tersebut, dan juga untuk mencapai program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun sejak tahun 2004, maka salah satu kunci untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

- Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, sistem kontrak, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

- **Infrastruktur, mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.**⁴²

Dalam sektor pertambangan minyak dan gas (migas), iklim investasi merupakan hal yang sangat penting untuk dibenahi, termasuk dalam hal kejelasan sistem kontrak eksplorasi sebagaimana terjadi dalam proses penetapan kontraktor di Blok Cepu. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menumbuhkan investasi di sektor ini dikarenakan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Sektor pertambangan, termasuk minyak dan gas, memberikan kontribusi sebanyak 9% pada Gross Domestic Product Indonesia di tahun 2000, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Struktur Gross Domestic Product Indonesia



Source: International Monetary Fund IMF, Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB)

Selama periode 2004-2006, sektor migas menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar masing-masing 4%, 4,1% dan 5,2% terhadap PDB. Sedangkan di tahun 2007, sektor ini diharapkan masih bisa menghasilkan penerimaan negara sebesar 4,1% terhadap PDB (RAPBN 2007).⁴³ Sektor pertambangan juga berkontribusi ke perekonomian Indonesia melalui penerimaan

⁴² JALAN MENUJU PEMULIHAN Memperbaiki iklim investasi di Indonesia, Asian Development Bank 2005

⁴³ Indonesia Energy Information Center – INDENI, 7 November 2006, www.indeni.org

pajak, sektor tersebut menyumbang hampir 50 % pendapatan pajak. Investasi di bidang pertambangan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sekitar 30.000 pekerja yang terlibat di sektor pertambangan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pekerja Pertambangan Indonesia

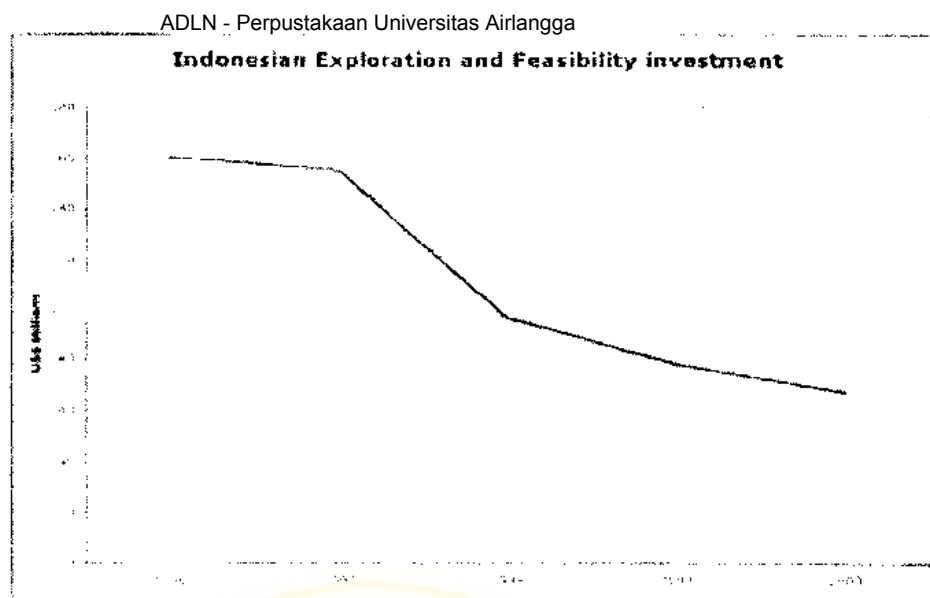
**Mining Employment in Indonesia
1996-2000**

	1996	1997	1998	1999	2000
Total direct employment	31,489	33,736	33,931	37,877	32,787
Indonesian Employees	30,859	33,063	33,215	36,887	32,189
Expatriate employees	630	673	716	990	598

Source: PricewaterhouseCoopers 2001.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa total pekerja Indonesia yang terlibat dalam industri pertambangan sejak tahun 1996 – 2000, mencapai 16.6213 orang. Hal ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah tahun 1999, terjadi penurunan yang sangat berarti dikarenakan adanya krisis ekonomi dan ketidakstabilan kondisi politik Indonesia. Semenjak pertengahan tahun 1997 – 2000, terdapat 150 proyek eksplorasi yang tidak aktif, ditunda, dan terbengkalai, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5 Tingkat Investasi Eksplorasi Indonesia



Source: PricewaterhouseCoopers 2001.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), MS Hidayat meminta iklim investasi dalam usaha hulu atau eksplorasi minyak dan gas (migas) diperbaiki dikarenakan investasi dalam usaha hulu migas risikonya sangat tinggi. Kegiatan eksplorasi migas membutuhkan biaya besar, sedangkan tingkat keberhasilannya tidak dapat dijamin. Industri hulu migas tidak hanya berisi pengujian seismik atau teknik pengeboran tiga dimensi yang rumit, namun juga usaha-usaha konstruksi, testing dan sertifikasi, persewaan alat-alat berat, pengadaan barang dan jasa, hingga usaha kecil menengah seperti perusahaan jasa boga dan jasa kebersihan.⁴⁴ Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Priyo Pribadi Soemarno, mengatakan, kalau iklim investasi di bidang pertambangan tidak dijaga dengan baik, maka Indonesia bakal kehilangan potensi devisa negara sekitar 4,4 hingga 7 miliar dolar AS.⁴⁵ Oleh karena itulah, pemerintah berusaha memperbaiki iklim investasi untuk menunjang perkembangan sektor

⁴⁴ Iklim investasi perlu diperbaiki, www.kompas.com, diakses tanggal 24 November 2004

⁴⁵ Ada Apa dengan Iklim Investasi Indonesia, Suara Karya, 16 Januari 2006

pertambangan, sehingga dapat memberi kontribusi positif bagi perekonomian nasional.⁴⁶

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga



⁴⁶ OECD Foreign Investment Conference. Paris, February 2002, Indonesia's Experience, Mining and copper 1990-2000, International Copper Study Group

II.2 Kepentingan ExxonMobil terhadap Blok Cepu

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
ExxonMobil adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang minyak dan gas, baik dalam hal eksplorasi, produksi, penyediaan, transportasi, dan pemasaran. Jangkauan operasional ExxonMobil mencakup 118 negara, dibawah label Exxo, Esso, dan Mobil.⁴⁷ Sebagai sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang minyak dan gas, maka ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku sangatlah penting demi operasionalisasi perusahaan. Untuk memperlancar gerak bisnisnya, ExxonMobil menggabungkan data-data reliabel dari berbagai pihak, baik dari kelompok ahli ekonomi dan energi, semacam Agensi Energi, Departemen Energi Amerika Serikat, Komisi Eropa, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan energi di masa depan, yang tertuang dalam visi perusahaan *The Outlook for Energy, A view to 2030*. Pada tahun 2030, permintaan global akan minyak dan gas diperkirakan mencapai 200 MBDOE (Million Barrels per day oil-equivalent), atau bertambah 60 % apabila dibandingkan dengan permintaan di tahun 2000. Peningkatan permintaan tersebut menggambarkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama di negara sedang berkembang. Sedangkan berdasar data survei geologi Amerika Serikat, persediaan minyak bumi sekitar 6 – 8 triliun barel, dan hanya sekitar 3 triliun barel yang merupakan *recoverable resources*. Sumber tersebut merupakan persediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi dan cara pemenuhan sumber energi pada tahun 2030, akan tetap didominasi oleh minyak bumi dan gas sebanyak 60 %. Selain itu, batu bara, tenaga nuklir, dan tenaga air juga menjadi sumber persediaan energi yang cukup penting. Tenaga angin dan solar akan diperkirakan akan memenuhi kebutuhan energi sebanyak 1 % di tahun 2030.

⁴⁷ www.exxonmobil.com

Walaupun, ExxonMobil turut aktif mendukung penelitian untuk mengembangkan sumber energi alternative, namun ExxonMobil memperkirakan bahwa hingga tahun 2030, permintaan pasar masih akan tetap dipenuhi dari persediaan minyak bumi dan gas. Tantangan bagi ExxonMobil adalah bahwa persediaan tersebut sangat bergantung pada perolehan akses untuk mengeksplorasi sumber minyak bumi yang ada. Perkembangan kerjasama dengan pemerintah suatu negara sangatlah penting untuk menumbuhkan investasi, dalam kerangka ketergantungan global hingga dapat menjamin keamanan persediaan sumber minyak bumi dan gas bagi kebutuhan pasar internasional. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu penopang untuk mengefektifkan usaha eksplorasi. Agensi Energi Internasional memperkirakan biaya investasi sebesar 8 triliun USD untuk perkembangan eksplorasi minyak dan gas.

CEO ExxonMobil Lee Raymond menyatakan bahwa kepentingan utama ExxonMobil adalah untuk menyediakan komoditas, sumber energi, bagi mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat global.⁴⁸ Dalam industri energi, ExxonMobil berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terkemuka. Namun, yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan persediaan sumber daya alam tersebut. Minyak bumi dan gas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itulah akses terhadap sumber faktor produksi menjadi sangat penting bagi ExxonMobil.

Dalam usahanya untuk mencari sumber faktor produksi, Indonesia memiliki peran yang cukup penting. ExxonMobil telah beroperasi di Indonesia sekitar 100 tahun, dengan salah satu proyeknya adalah gas alam Arun di Aceh. Keterlibatan ExxonMobil di Blok Cepu, dimulai saat Mobil Oil mengakuisisi Ampolex yang

⁴⁸ *Speeches and Interview by Lee Raymond*, www.exxonmobil.com

memiliki 49% saham blok Cepu. Kemudian di tahun 1999, Mobil Oil melakukan merger dengan Exxon, dan pada bulan Juni 2000, membeli sisa 51% kepemilikan saham PT Humpus Patragas di Blok Cepu. Dengan begitu ExxonMobil menjadi pemegang *Techninal Assistance Contract* hingga 2010. Pada tahun 2001, ExxonMobil dibawah anak perusahaannya, yaitu Mobil Cepu Ltd, telah melakukan eksplorasi di sumur Banyu Urip dan menemukan cadangan minyak bumi yang diperkirakan mencapai 600 juta barrel, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini⁴⁹:

Tabel 2.6 Sejarah Pemboran Lapangan Banyuurip

SEJARAH PEMBORAN LAPANGAN BANYUURIP (BERDASARKAN Scout check report)

Date Spud-in	Date Compl	OPERATOR	WELL-NAME	TD (M)	RESULT	NOTES	NOTES-2	NOTES-3	NOTES-4	NOTES
1998.07.13	1998.08.21	Humpuss Patragas	Banyu-urip-01	1347	SP tight	Target Kujung Fm	Mobil Participat ion			
2000.01.08	2000.02.01	Humpuss Patragas	Banyu-urip-03	826	SP Unknown					
2000.11.04	2001.02.05	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip-03	2152	SP Oil well	Kujung	re-entry	3906 BOPD	91 m gas column, 305 m oil column From reef and clastics	Discovery well
2001.02.07	2001.04.03	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip-01	1850	CP Oil/Gas well	Kujung	re-entry	9000 BOPD		
2001.04.07	2001.08.28	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip A-01	1937	SP Oil well	Kujung & clastics	Proposed TD 2242 m (TVD: 2010)		DST#1: 3906 BOPD DST#2: 750 BOPD + gas	
2001.08.03	2001.08.28	Mobil Cepu Ltd	Banyu-urip A-02	2503	PA Oil well	Target: Ngrayong clastics	Proposed TD: 2529 m (1565 m TVD)		Tested	

⁴⁹ SEJARAH EXPLORASI DAERAH MIGAS CEPU SAMPAI DIKETEMUKANNYA LADANG MINYAK BANYU URIP oleh R.P. Koesoemadinata, dari PRAKTEK KULIAH LAPANGAN MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO DALAM KERJASAMA EKSPLOKASI MINYAK BUMI ANTARA INDONESIA (PERTAMINA) DENGAN EXXON MOBILE, Mahasiswa FISIP UNAIR Juni 2006

Hal inilah yang kemudian membuat ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak hingga 2030. Cadangan minyak yang mencapai 600 juta barel di Blok Cepu, sangatlah penting bagi ExxonMobil. Selain dapat menambah sumber faktor produksinya, penemuan tersebut membuat investasi eksplorasi ExxonMobil yang telah menghabiskan biaya sebanyak 400 juta USD di Blok Cepu tidak sia-sia⁵⁰.



⁵⁰ ExxonMobil jadi Operator Cepu, Kompas, Selasa, 14 Maret 2006

BAB III

DIPLOMASI INDONESIA - EXXONMOBIL

III.1 Identifikasi Masalah dalam Penetapan Kontraktor Blok Cepu

Mengingat kepentingan pemerintah Indonesia untuk menyediakan sumber energi, dalam hal ini minyak bumi dan gas, bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah Indonesia menginginkan kelancaran proses penetapan kontraktor Blok Cepu, demi percepatan proses produksi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkepentingan untuk memperbaiki iklim investasi, melalui peningkatan efektifitas dalam proses sistem kontrak. Dengan begitu diharapkan, investasi asing langsung akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan nasional.

Sebelumnya pada bulan Agustus 2004, ExxonMobil meminta keterlibatan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini, setelah proses negosiasi menemui jalan buntu. Saat itu, pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan intervensi perundingan bisnis antara Pertamina dan Exxon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa masalah kontrak Exxon di Cepu merupakan masalah perseroan karena ladang Cepu termasuk wilayah kerja Pertamina, sehingga kewenangan untuk mengelolanya berada di tangan perusahaan negara itu. Karena itu negosiasi juga harus dilakukan Pertamina dengan Exxon secara langsung, bukan dengan pemerintah. Sedangkan

pemerintah hanya menerima laporan resmi dari Pertamina, melalui BP Migas.⁵⁰ Namun, dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dari Direksi Pertamina untuk berunding dengan pihak ExxonMobil sebagai pemegang *Technical Assistance Contract*, sejak ditandatanganinya *Head of Agreement* pada bulan Juni 2004, maka pemerintah Indonesia akhirnya turut aktif dalam proses penetapan kontraktor Blok Cepu.

Sedangkan dalam posisinya sebagai sebuah perusahaan multinasional, ExxonMobil memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber faktor produksinya, yaitu minyak bumi dan gas. Hal ini dikarenakan, ExxonMobil menempatkan prioritas utamanya untuk menyediakan kebutuhan pasar global akan sumber energi, minyak dan gas. Dari sudut pandang ExxonMobil, pengelolaan Blok Cepu dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk menyediakan pasokan minyak bagi pasar global, dimana hal ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi ExxonMobil sebagai perusahaan multinasional global dalam industri minyak.⁵¹ Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan Blok Cepu, ExxonMobil memiliki tujuan untuk mendapatkan ijin pengelolaan dari Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan Pertamina, dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia demi meminimalisir resiko investasi dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, dalam sebuah perundingan terkait kontrak eksplorasi minyak bumi dan gas, maka terdapat tiga isu utama, yaitu mengenai *participating interests* (PI), pembagian hasil (PH), dan operatorship. Bagi Pertamina,

⁵⁰ Retno Sulistyowati, *Pemerintah tak akan intervensi kasus exxon cepu*, Senin, 30 Agustus 2004, <http://www.tempointeraktif.com/>

⁵¹ *ExxonMobil and Pertamina Sign Joint Operating Agreement for Cepu Block*, Business Wire, 15 Maret 2006

perundingan diarahkan untuk mendapatkan nilai *participating interest* yang tinggi. Hal ini dikarenakan, dari sudut pandang Pertamina, Blok Cepu secara *historical* merupakan wilayah kerja Pertamina, dan Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan perusahaan.⁵² Dalam permasalahan pembagian hasil, hal ini terkait erat dengan kepentingan pemerintah pusat Indonesia, dan juga pemerintah daerah Blok Cepu, sedangkan pihak Indonesia menginginkan adanya pembagian hasil yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan adanya dampak nyata bagi pembangunan daerah. Sedangkan bagi ExxonMobil, mereka menginginkan adanya kestabilan pengelolaan manajemen dalam isu operatorship, demi efisiensi dan efektifitas eksplorasi Blok Cepu.

III.2 Langkah Upaya Diplomasi Indonesia – ExxonMobil dan Hasil Kesepakatan

III.2.1 Pola Diplomasi Indonesia

Pola diplomasi Indonesia dapat dibagi berdasar *track* yang digunakan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam proses penetapan kontraktor Blok Cepu, sebagai berikut:

❖ Aktifitas *Track* Pemerintah:

- a. Pembentukan Tim Negosiasi untuk melanjutkan proses negosiasi antara Indonesia dengan ExxonMobil yang sempat terhenti.**

⁵² *Joint Operation Agreement Masuki Babak Akhir*, www.pertamina.com, Jakarta, 20 February 2006

Pada tanggal 26 November 2004, Menteri Koordinasi Perekonomian mengeluarkan surat No: S-54/M.EKON/11/2004 kepada Direktur Utama Pertamina, mengenai arahan Presiden untuk memulai kembali perundingan Blok Cepu dan menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian, pada tanggal 25 Februari 2005 keluar Surat Menteri Sekretaris Negara No: R.22/M.Sesneg/2/2005 ditujukan kepada Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Pertamina, mengenai arahan Presiden agar PT Pertamina memulai perundingan Blok Cepu untuk mendapatkan nilai maksimum bagi pendapatan negara. Hal ini akhirnya menyebabkan pada tanggal 29 Maret 2005 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menerbitkan surat keputusan No: Kep-16/MBU/2005 tentang "Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu. Pembentukan tim tersebut adalah langkah yang ditempuh untuk mendorong dimulainya kembali perundingan.⁵³

Tim negosiasi beranggotakan unsur pemerintah dari departemen terkait, serta unsur Pertamina yang diwakili komisaris dan direksi. Keterlibatan unsur pemerintah dalam Tim Negosiasi adalah untuk menjamin kepentingan negara terakomodasi sepenuhnya dalam penyelesaian penetapan kontraktor Blok Cepu. Tim Negosiasi sendiri diketuai oleh Komisaris Utama Pertamina Martiono, Staf Ahli Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Lie Chi Wei sebagai sekretaris,

⁵³ *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta & sekitarnya, Rabu, 26 April 2006 Universitas Indonesia, hal.7

dan anggota yang terdiri dari Komisaris Pertamina Muhammad Abduh dan Umar Said, Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko Soleh, Direktur Penerimaan Migas Departemen Keuangan Sahala Lumban Gaol, Staf Ahli Menko Perekonomian Muhammad Ikhsan, dan Rizal Mallarangeng sebagai juru bicara, di bawah arahan Menteri Koordinasi Perekonomian Aburizal Bakrie. Kemudian, saat posisi Menteri Koordinasi Perekonomian dipegang oleh Boediono, posisi ketua Tim Negosiasi, diganti oleh Roes Aryawijaya, dan Tim Negosiasi Blok Cepu diubah menjadi bertanggung jawab kepada Tim Pengarah yang terdiri dari empat menteri, yaitu Menteri Koordinasi Perekonomian sebagai ketua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Keuangan.

Tim Negosiasi telah melakukan pertemuan sebanyak 31 kali pertemuan. Yaitu 12 kali pertemuan koordinasi dengan Komite Pengarah (Menteri Koordinasi Perekonomian sebagai ketua, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan dengan Presiden dan 3 kali pertemuan dengan Wakil Presiden. Selain itu, terdapat juga 8 kali pertemuan internal antara anggota tim negosiasi sendiri, dan 11 kali pertemuan dengan pihak ExxonMobil. Salah satu pertemuan tim negosiasi dengan pihak Exxon, terjadi pada tanggal 20 April 2005 di Departemen Keuangan, melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pormomo Yusgiontoro, Menteri Koordinasi Perekonomian, Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan, Jusuf Anwar. Juru bicara tim negosiasi, Rizal Malarangeng mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan formal untuk membahas

secara detail teknis-teknis tentang rencana penandatanganan kesepakatan Pertamina - ExxonMobil.⁵⁴

Negosiasi di bawah Tim Negosiasi melanjutkan kesepakatan awal dalam dokumen *Head of Agreement*, yang menetapkan pembagian PI bagi Exxon 50 persen, dan bagi Pertamina 50 persen, serta pembagian hasil 60:40. Dengan ini, jika produksi telah dimulai, maka pembagian hasil bagi pemerintah pusat 60 %, Pertamina 20 % (50 % x 40), Exxon 20 %, berdasar sistem *adjusted split*.⁵⁵ Pembagian berdasarkan sistem *adjusted split* berarti pembagian hasil akan berubah sesuai dengan harga minyak di pasar internasional sebagai berikut⁵⁶:

Tabel 3.1 Formulasi Pembagian Minyak KKS Blok Cepu

Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calendar Year		PEMERINTAH	CONTRACTOR
Greater than or equal to	Less than		
0	35	70%	30%
35	40	75%	25%
40	45	80%	20%
45	-	85%	15%

⁵⁴ Suryani Ika Sari, *Aburizal: Kesepakatan Pertamina-Exxon terlalu kecil*, www.tempointeraktif.com. Rabu 20 April 2005

⁵⁵ Rizal Malarangeng, *Blok Cepu, Mission Accomplished*, TEMPO 05/XXXVI/27 Maret - 2 April 2006

⁵⁶ *Production Sharing Contract Blok Cepu, Loc.cit*, hal.9

Sedangkan hasil perundingan akhirnya menetapkan komposisi PI 85 % untuk pemerintah dan 15 % operator, lalu dari 15 % tersebut dibagi lagi 45 % Exxon ($45\% \times 15\% = 6,75\%$), 45% ($45\% \times 15\% = 6,75\%$) Pertamina, dan 10 % ($10\% \times 15\% = 1,5\%$) Pemda Jatim dan Jateng, yang didapat secara proporsional dari Exxon dan Pertamina. Hasil kesepakatan antara Tim Negosiasi dan ExxonMobil yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2005. Kesepakatan ditandatangani oleh Martiono Hadianto sebagai Ketua Tim Negosiasi Blok Cepu, Presiden Mobil Cepu Ltd S. Grenlee, Managing Director Ampolex Pte Ltd, dan disetujui oleh Menteri Koordinasi Perekonomian Aburizal Bakrie. Salah satu kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut adalah perubahan konsep pengelolaan Blok Cepu dari *Technical Assistance Contract* menjadi bentuk Kontrak Kerja Sama. Konsep *Technical Assistance Contract* sendiri (TAC) merupakan konsep yang ditujukan untuk lapangan yang telah dieksplorasi, namun dengan kondisi lapangan sudah tua, tidak dalam produksi, dan tidak memiliki nilai keuntungan ekonomi tinggi. Tujuan utama bentuk pengelolaan TAC adalah untuk mempercepat peningkatan produksi dan eksploitasi pada cadangan minyak. Dalam kontrak TAC, kontraktor bertindak sebagai operator, dan harus memberikan bantuan teknik untuk operasi perminyakan dan bertanggung jawab kepada Pertamina untuk pelaksanaan operasi. Pada awalnya, hak pengelolaan di Blok Cepu yang dimiliki PT Humpus Patragas diatur dalam bentuk TAC, sehingga Blok Cepu sepenuhnya tetap dimiliki oleh Pertamina, sedangkan PT Humpus Patragas sebagai operator hingga

tahun 2010. Namun setelah ExxonMobil menemukan cadangan minyak di sumur Banyu Urip, maka sistem kontrak TAC sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, sesuai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebenarnya tidak ada lagi bentuk TAC dalam pengelolaan wilayah kerja migas, maka TAC yang masih berlaku harus diubah menjadi KKS.


Dalam kesepakatan untuk mengakhiri TAC dan perubahan kontrak menjadi sistem Kontrak Kerja Sama, maka hak pengelolaan Blok Cepu yang awalnya milik Pertamina sepenuhnya, dibagi 50 % dengan ExxonMobil. Blok Cepu sendiri terdiri atas beberapa lapangan, antara lain Banyu Urip, Alas Dara, Kemuning, Jambaran, Sukowati, Cendana, dan Kedung Tuban. Dalam perubahan hak pengelolaan tersebut, terdapat kesepakatan mengenai hak pengelolaan di lapangan Sukowati dan Kedung Tuban tetap menjadi milik Pertamina seutuhnya⁵⁷ dan ExxonMobil harus membayar kompensasi, sebesar 400 juta USD, 112 juta USD (sekitar Rp 1,1 triliun) secara tunai, sebagian lain dalam bentuk inkind (prosedur pembayaran dengan produk yang dilakukan terus-menerus).

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* pada tanggal 25 Juni 2005, maka akhirnya Kontrak Kerja Sama dengan jangka waktu 30 tahun, ditandatangani oleh BP Migas atas nama Pemerintah, Pertamina, dan ExxonMobil pada tanggal 17 September 2005. Hasil Kontrak Kerja Sama dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ *Tukar guling Blok Cepu disepakati Juni 2005, Pertamina tak ikut teken MoU*, Bisnis-Indonesia, 20 Maret 2006

⁵⁸ *Production Sharing Contract Blok Cepu*, Loc.Cit

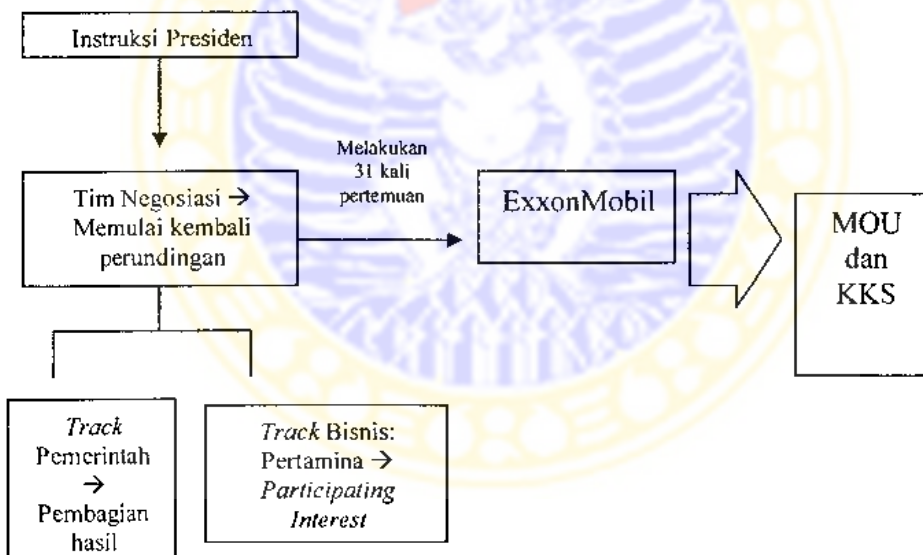
Tabel 3.2 Batasan dan Kondisi Kontrak Kerjasama Blok Cepu

BATASAN & KONDISI KONTRAK KERJASAMA BLOK CEPU		
> Jangka Waktu		: 30 tahun
> Pemegang Interest Gov't		: PERTAMINA 45%, EM 45% & Local 10%
> Split	Minyak	: Berdasarkan Sliding Scale Harga Minyak.
>	Gas	: Pemerintah : 65% & Contarctor : 35% (After tax).
> FTP		: 20%
> DMO Volume		: 25%
> DMO fee		: 25% dari hrg pasar (DMO holiday 5 tahun).
> Investment Credit		: 15.78% (Oil & Gas).
> Tax		: 44%

Perpanjangan kontrak ExxonMobil hingga 30 tahun dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005, pada tanggal 7 September 2005 dalam pasal 103A ayat 1 huruf e jo. Pasal 103D diatur bahwa Menteri dengan persetujuan Presiden dapat melakukan pengecualian mengenai jangka waktu kontrak, dalam hal ini berdasarkan pasal 104 huruf e dan g PP No. 35 Tahun 2004, kontrak-kontrak yang berupa TAC dan EOR beralih kepada PT Pertamina (Persero), berlaku sampai habis waktu kontraknya dan setelah kontrak berakhir wilayah bekas kontrak tersebut menjadi wilayah kerja Pertamina. Dengan begitu, TAC Blok Cepu yang baru berakhir tahun 2010 pada tahun 2005 dihapuskan

berubah menjadi Kontrak Kerja Sama, dengan jangka waktu 30 tahun.⁵⁹ Pemerintah Indonesia menjelaskan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, bahwa hasil Kontrak Kerja Sama sangat menguntungkan perekonomian nasional, karena berdasar Peraturan Pemerintah No. 34/2005, maka berapa pun bagian Pertamina yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama, Pertamina akan mendapat tambahan bagian 40 % dari Blok Cepu. Hasil kesepakatan dalam menyelesaikan masalah *participating interest*, dan pembagian hasil ini dinilai oleh Pemerintah Indonesia sebagai sebuah keberhasilan dalam mencapai kepentingan nasional. Pola diplomasi Indonesia dengan pembentukan tim negosiasi, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Pembentukan Tim Negosiasi



⁵⁹ Teddy Anggoro, *Kajian Kritis Terhadap Permasalahan Hukum yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (Studi Kasus ExxonMobil Oil Indonesia sebagai Lead Operator Blok Cepu)*, http://www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=71, diakses 2 Februari 2007

❖ Aktifitas *Track Bisnis*

a. Perundingan antara Pertamina dan ExxonMobil untuk menentukan *Joint Operating Agreement*

Setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama pada tanggal 17 September 2005, maka telah dicapai kesepakatan mengenai *participating interests*, dan pembagian hasil dalam eksplorasi Blok Cepu. Proses diplomasi selanjutnya masih harus menentukan mengenai posisi operator, dalam hal ini pemerintah Indonesia menyerahkan proses perundingan kepada ExxonMobil dan Pertamina untuk diselesaikan berdasarkan kesepakatan bisnis. Walaupun begitu, Tim Negosiasi di bawah pimpinan Roes Aryawijaya tetap memantau dan memfasilitasi proses perundingan.

Perundingan kemudian bergulir menuju kemungkinan adanya sebuah perusahaan gabungan, Pertamina dan ExxonMobil akan memegang posisi operator bersama. Pada bulan Desember 2005, Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama masih belum dapat memutuskan apakah Pertamina akan menerima solusi yang diajukan oleh Ketua Tim Negosiasi Cepu Roes Aryawijaya, untuk membentuk perusahaan patungan antara Exxon dan Pertamina. Dalam badan yang disebut *joint operating committee*, operator eksplorasi di Blok Cepu akan ditangani secara bersama oleh ExxonMobil dan Pertamina.⁶⁰

Hingga awal tahun 2006, kesepakatan mengenai bentuk *joint operating agreement* masih belum mencapai kesepakatan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kembali terlibat dikarenakan penundaan eksplorasi berarti penundaan

⁶⁰ *Pertamina janji selesaikan masalah Cepu bulan ini*, Tempo interaktif, Senin, 5 Desember 2005

ketersediaan pasokan minyak bumi dan gas bagi kebutuhan nasional yang mendesak. Pada bulan Februari 2006, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pertamina untuk segera mengambil kesepakatan dengan ExxonMobil mengenai posisi operator di Blok Cepu. Juru bicara Pertamina Muhammad Harun menanggapi permintaan wakil presiden untuk mempercepat proses perundingan dengan ExxonMobil. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi walau perundingan telah mencapai beberapa kemajuan. Dari 34 item yang diajukan dalam perundingan *joint operating agreement* (JOA) Blok Cepu, yang masih menjadi permasalahan adalah mengenai *cost recovery* (biaya pengeluaran dalam proses eksplorasi yang akan diganti oleh Pemerintah melalui BP Migas), *sunk cost* (biaya yang hilang dan telah dikeluarkan), dan penalti untuk pelanggaran terhadap kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani. Terdapat perbedaan penetapan perkiraan biaya eksplorasi, dimana ExxonMobil menetapkan perkiraan biaya sebesar USD 12 juta, sedangkan Pertamina memperkirakan bahwa seharusnya biaya eksplorasi cukup USD 3 juta - USD 4 juta. Dalam hal ini biaya yang akan dikeluarkan dalam proses eksplorasi akan menjadi *cost recovery*. President and General Manager ExxonMobil Peter J. Coleman mengakui bahwa biaya eksplorasi ExxonMobil di blok Cepu memang mahal. Menurut Coleman, mahalnya biaya eksplorasi tersebut disebabkan ExxonMobil menggunakan teknologi biaya tinggi, seperti survei seismik, akumulasi hidrokarbon drilling, dan standar keselamatan lingkungan. Untuk Joint Operation, Pertamina maupun ExxonMobil telah sepakat untuk melibatkan tenaga ahlinya secara bersama-sama di semua level organisasi dengan mekanisme pengawasan secara transparan.

Khusus untuk pemegang kendali utama operasi (operatorship) yang bertanggungjawab terhadap blok Cepu, Pertamina mengajukan opsi untuk dilakukan secara bergantian setiap lima tahun. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI sebelumnya karena pada awalnya Pertamina mengajukan opsi untuk bertindak selaku pengendali utama operasi Blok Cepu selama masa pengelolaan lapangan (30 tahun).

Alasan utama Pertamina mengajukan opsi ini karena untuk kepentingan nasional (national interest), Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah diberi kesempatan untuk tumbuh (growth). Alasan kedua karena secara historical Blok Cepu merupakan Wilayah Kerja Pertamina (WKP) Pertamina. Ketiga adalah biaya investasi dan operasi pengelolaan Blok Cepu akan lebih ekonomis bila kendali utama operasi dipegang oleh Pertamina, hal disebabkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara biaya yang dikeluarkan ExxonMobil dengan Pertamina pada standar operasi yang sama. Keempat, pengembangan Blok Cepu erat kaitannya dengan pengembangan kredibilitas Pertamina selaku perusahaan minyak nasional yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan industri migas di tanah air. Pada pembicaraan tentang biaya-biaya yang telah dikeluarkan (sunk cost), Pertamina dan ExxonMobil mendekati kata sepakat untuk menghitung berdasarkan besaran pengeluaran sesuai jumlah yang telah diaudit.⁶¹ ExxonMobil menolak keinginan Pertamina untuk memegang posisi operator dikarenakan dari sudut pandang ExxonMobil, hak operator secara eksplisit otomatis berada pada manajerial

⁶¹ *Joint Operation Agreement Masuki Babak Akhir*, www.pertamina.com, Jakarta, 20 February 2006

ExxonMobil berdasarkan Cedu Memorandum yang ditandatangani pada bulan Juni 2005. Selain itu, pergantian operator tiap lima tahun sekali akan menyebabkan ketidakstabilan manajemen. Oleh karena itulah, ExxonMobil menolak keinginan Pertamina yang menginginkan pergantian operator selama lima tahun sekali.⁶²

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor penting sebagai penentu kelayakan pemegang hak operator, yaitu⁶³:

1. Kemampuan untuk melakukan produksi yang lebih cepat.

Pertamina telah mengajukan *Capital Expenditure* (CAPEX) atau biaya investasi dan *Operational Expenditure* (OPEX) kepada pemerintah sebesar 100 juta USD pertahun. Sedangkan ExxonMobil mengajukan total *Capital Expenditure* dan *Operational Expenditure* sebesar 260 juta USD.

2. Kesiapan dana.

Sejak bulan Oktober 2005, Pertamina telah mendapatkan banyak tawaran pinjaman. Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama, mengatakan semua bank nasional milik pemerintah telah menyatakan kesediaannya untuk meminjamkan dana kepada Pertamina, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Selain itu, perbankan asing juga banyak yang menyatakan kesediaan, seperti City Group, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS (Amerika Serikat), HSBC, CSFB, dan JBIC. Widya mengaku telah menerima tawaran pinjaman dari bank-bank tersebut secara informal. Kebutuhan dana Pertamina untuk mengelola Blok Cedu adalah 45

⁶² Pertamina, *Exxon Cedu deal "long way off"*: Source Koran The Jakarta Post, 16 Maret 2006

⁶³ Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga pernyataan Menteri Negara BUMN Sugiharto mengenai pandangan pemerintah bahwa pemegang posisi operator di Blok Cedu ditentukan oleh lima kriteria, Indo Pos, 5 Maret 2006

persen dari total investasi yang akan ditanamkan pada saat pengembangan lapangan.⁶⁴ Sedangkan bagi ExxonMobil, dana bukanlah sebuah masalah mengingat keuntungan perusahaan yang mencatat rekor penerimaan tertinggi perusahaan di tahun 2005 sejumlah 370. 680 milyar USD.

3. Kemampuan teknologi.

Pertamina memang tidak memiliki teknologi, tetapi pengadaan teknologi sudah dimasukkan ke dalam biaya operasi yang diajukan oleh Pertamina. Selain itu, Pertamina juga memiliki sumber daya manusia yang unggul. Abdul Muthalib Masdar yang merupakan Ketua Umum Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) dan juru bicara Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyatakan bahwa anggota HAGI dan IAGI yang bekerja di Pertamina sebanyak 2.417 orang berpendidikan S3, S2 dan S1. ExxonMobil sendiri memiliki keunggulan teknologi, yang dibuktikan dari suksesnya pengeboran yang menemukan cadangan minyak di Blok Cepu pada tahun 2001, dengan menggunakan survey seismik tiga dimensi.

4. Pengalaman operator dalam melakukan eksplorasi di daerah lain

Sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), secara geologi, play Blok Cepu sama dengan play lapangan migas yang ada di sekitarnya seperti Mudi, Sukowati, dan Kedung Tuban, dengan kedalaman obyektif/reservoir penghasil Hidrokarbon Kujung Formation (carbonate relatif sama, yaitu antara 4000-10000 feet. Di lapangan Sukowati dan Mudi, yang dikelola Pertamina-Petrochina East Java

⁶⁴ *Perbankan siap danai Blok Cepu*, www.tempointeraktif.com, Sabtu, 8 Oktober 2005

dengan produksi 16-20 ribu BOPD, semua posisi kunci dipegang oleh tenaga ahli Pertamina.⁶⁵ Sedangkan ExxonMobil merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang energi, dengan kegiatan operasi di lebih dari 200 wilayah dan negara seluruh dunia.⁶⁶

Proses perundingan juga diwarnai oleh pergantian posisi Direktur Utama Pertamina. Pada tanggal 3 Maret 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa manajemen Pertamina perlu diperbaharui.⁶⁷ Di saat yang bersamaan, pemerintah juga menggelar rapat terbatas membahas Blok Cepu di Kantor Presiden, Kompleks Istana. Rapat dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla, Menteri Koordinasi Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Menurut Sugiharto, pengelolaan Blok Cepu menjadi sangat instrumental bagi APBN 2006. Dengan potensi minyak mentah 170.000 barel per hari, produksi Blok Cepu akan menambah 17-20 persen produksi migas nasional. Keuntungan devisa mencapai 9,2 juta dolar AS perhari jika asumsi minyak 60 dolar AS per barel, sedangkan penundaan produksi akan menyebabkan *opportunity loss* sebesar 9,2 juta USD per hari.⁶⁸ Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Maret 2006, Ari Soemarno yang sebelumnya menjabat Direktur Niaga dan Pemasaran BUMN, dilantik menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Widya Purnama. Jabatan Wakil

⁶⁵ Surat Terbuka untuk Presiden SBY, Rakyat Merdeka, 19 April 2006

⁶⁶ www.exxonmobil.com

⁶⁷ *Awas salah pilih Dirut Pertamina*, Rakyat Merdeka, 4 Maret 2006

⁶⁸ *Blok Cepu Masih Gagal*, Kompas, 4 Maret 2006

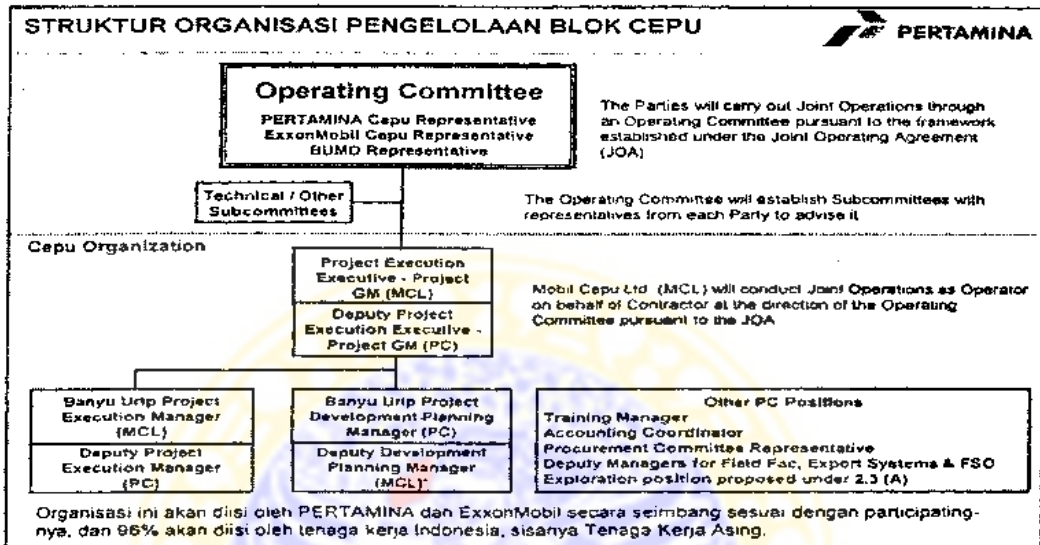
Direktur dipercayakan kepada Iin Arifin Takhyan, Direktur Keuangan dipegang oleh Frederick ST Siahaan, Direktur Niaga dan Pemasaran dijabat oleh Achmad Faisal, Direktur Hulu oleh Sukusen Soemarinda, Direktur Pengolahan oleh Suroso Atmomartoyo, dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum diserahkan kepada Sumarsono.

Pada acara serah terima jabatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menyatakan bahwa batas waktu negosiasi Blok Cepu akan dioptimalkan dalam 100 hari jabatan direksi yang baru. Kepada direksi baru, Sugiharto juga memberikan catatan khusus, yaitu kesuksesan Pertamina di masa yang akan datang, salah satu indikatornya adalah bertambahnya cadangan migas dan terjadinya peningkatan produksi. Ari Soemarno sendiri menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan proses perundingan mengenai operator Blok Cepu, berdasar kesepakatan bisnis. Walaupun banyak tuduhan bahwa pergantian direksi Pertamina terkait dengan Blok Cepu, tetapi Menteri Negara BUMN Sugiharto menegaskan, pergantian direksi PT Pertamina bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Pertamina. Hal ini didasari oleh kinerja buruk Pertamina dalam kasus pencurian minyak mentah dari pipa bawah laut di Lawe-lawe Kaltim ataupun juga penjualan tangker raksasa (VLCC), dan bukan dikarenakan sikap Widya Purnama yang bersikukuh untuk menempatkan Pertamina sebagai pemegang hak operator dalam eksplorasi Blok Cepu.⁶⁹

⁶⁹ *Blok Cepu ditarget 100 hari*, Kamis, 9 Maret 2006

Akhirnya pada tanggal 13 Maret 2006, kedua belah pihak menyepakati untuk bersama-sama bertindak sebagai kontraktor pemerintah dalam pengoperasian Blok Cepu sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:⁷⁰

Tabel 3.3 Struktur Organisasi pengelolaan Blok Cepu



Struktur organisasi terdiri dari Komite Operasi Bersama (KOB, *Joint Operating Committee/JOC*) dan Organisasi Pelaksana Proyek Cepu (OPPC). KOB terdiri dari 5 orang, masing-masing 2 dari Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Mobil Cepu Ltd./Ampolex Cepu Ltd. (MCL/ACL), dan 1 dari unsur Pemerintah Daerah. KOB dipimpin seorang Chairman/Ketua dari pihak PEPC (Pertamina), sedangkan OPPC dipimpin seorang General Manager dari pihak MCL/ACL (ExxonMobil), dengan Deputy General Manager dari PEPC. Di bawahnya ada manager pelaksana, dengan komposisi berimbang antara PEPC dan MCL/ACL.

Joint Operating Agreement (JOA) ditandatangani pada 15 Maret 2006, penandatanganan dilakukan antara Dirut PT Pertamina EP Cepu (PEPC), anak

⁷⁰ *Production Sharing Contract Blok Cepu*, Loc.Cit, hal 10

perusahaan Pertamina, Hestu Bagyo dan Presiden Direktur ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), Peter Coleman, yang mewakili anak perusahaan Mobil Cepu Limited (MCL) dan Ampolex Cepu Ltd (ACL). Penandatanganan disaksikan Direktur Utama PT. PERTAMINA Ari H Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Meneg BUMN Sugiharto. Hadir pula Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu (BP) Migas Kardaya Warnika, Komisaris Utama Pertamina Martiono Hadianto, Ketua Tim Negosiasi Blok Cepu Roes Aryawijaya, Vice President Planning, Commercial and Public Affairs EMOI Maman Budiman, dan Executive Director Exploration EMOI Budiono.

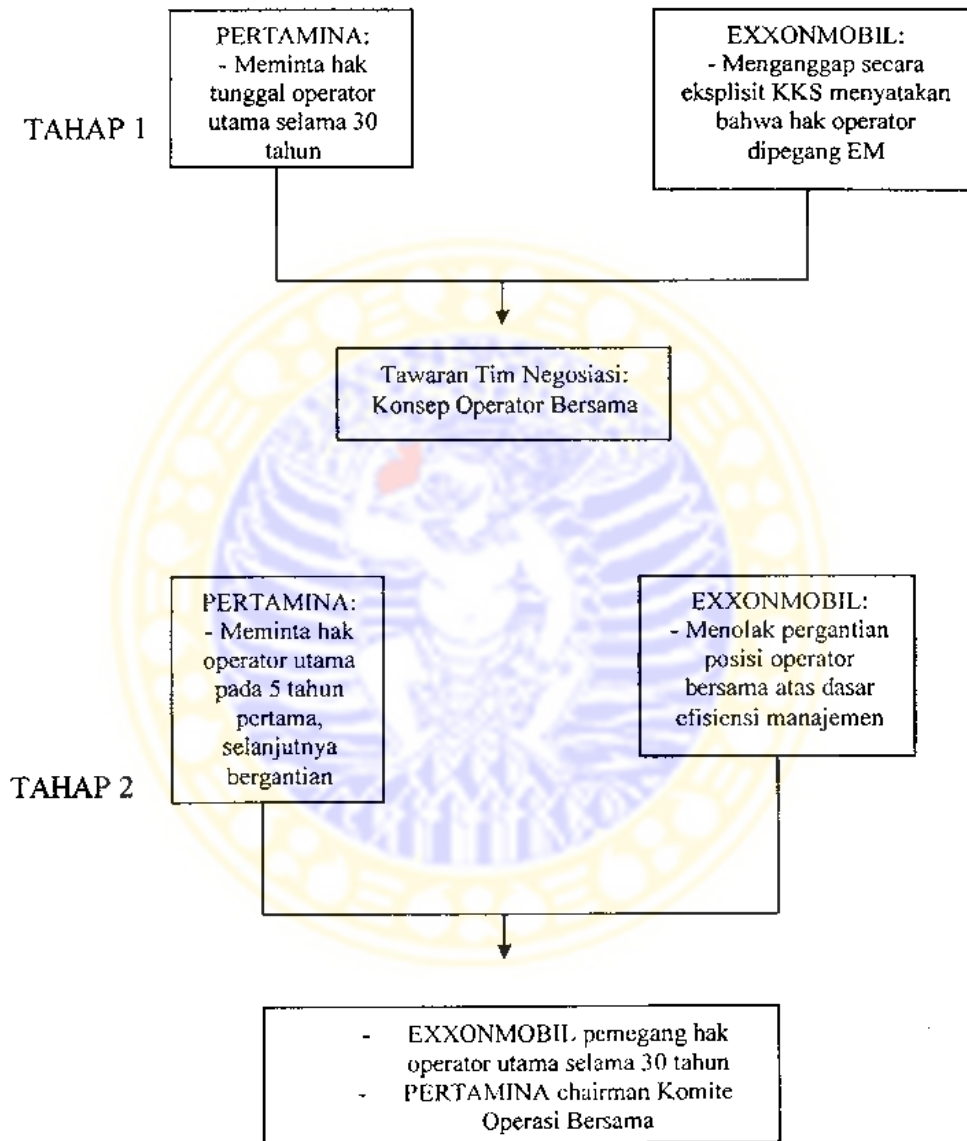
Penandatanganan tersebut mengakhiri berlarut-larutnya pembahasan JOA yang telah dilakukan sejak Oktober tahun lalu, karena baik Pertamina maupun ExxonMobil sama-sama berkeinginan menjadi operator di Blok Cepu.⁷¹ Dirut PT Pertamina, Ari H Soemarno, mengatakan pendapatan Blok Cepu akan mencapai 3,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp30 triliun per tahun. Sedangkan, walau posisi operator Blok Cepu dipegang ExxonMobil, namun Pertamina tetap memegang kendali operasi di Blok Cepu. Dalam *joint operating agreement*, kewenangan operasi dibagi secara bertingkat, dengan perwakilan masing masing pemilik PI secara proporsional dalam menentukan kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yang akan bertindak sebagai manajer umum, namun dalam melakukan aktivitasnya harus menyertakan Pertamina. Dengan semua itu, Pertamina akan memperoleh tambahan pendapatan dari keuntungan produksi di Blok Cepu. Selain itu, Pertamina juga mendapat kesempatan memperoleh transfer

⁷¹ *Pendapatan Blok Cepu 3,3 Miliar Dollar AS Per Tahun*, Kompas, 16 Maret 2006

teknologi dan manajemen dari perusahaan multinasional, yaitu ExxonMobil.⁷²

Gambaran proses tawar menawar menuju *Joint Operating Agreement* dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2 Tawar Menawar menuju *Joint Operating Agreement*



⁷² Rizal Malarangeng, *Blok Cepu, Mission Accomplished*, TEMPO 05/XXXV/27 Maret - 2 April 2006

❖ **Penggunaan *Track* Pemerintah untuk meredam resistensi dari *Track* Non Pemerintah/ Kelompok Ahli**

a. Adanya keterlibatan Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu yang menganalisa permasalahan yang terjadi.

Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu berencana membawa permasalahan Blok Cepu ke Mahkamah Agung. Mereka tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Ikut bergabung dalam wadah ini antara lain: Ikatan Alumni ITB, Alumni Universitas Indonesia, Serikat Pekerja Pertamina, beberapa lembaga swadaya masyarakat, sejumlah politisi dan tokoh masyarakat. Panji Hadinoto, koordinator hukum gerakan itu, menilai Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 sebagai penyebab masuknya Exxon ke minyak Cepu.⁷³ Selain itu, Pembentukan Tim Negosiasi Blok Cepu tanggal 29 Maret 2005 dinilai mengambil alih wewenang pengurusan BUMN oleh Direksi sebagaimana diatur dalam UU 19/2003 tentang Badan usaha Milik Negara, pasal 5 ayat 1 dan 2.⁷⁴

Pemerintah Indonesia berusaha meredam hal ini melalui statemen resmi yang menekankan mengenai keuntungan yang akan didapat dari hasil kesepakatan dengan ExxonMobil, akan memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan saat membuka seminar Desain Sistem Politik Baru Indonesia di kantor CSIS bahwa pemerintah diminta untuk memperhatikan kesejahteraan kepada rakyat seperti membangun rumah sakit dan memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Namun, menurutnya, banyak pihak

⁷³ *Suara-suara bernada Nasionalistis*, Majalah Tempo, Edisi 27 Maret-2 April 2006

⁷⁴ *Surat Terbuka untuk Presiden SBY*, Rakyat Merdeka, 19 April 2006

yang tidak melihat bahwa untuk membuat rumah sakit atau sekolah memerlukan dana. Dana tersebut, kata dia, bisa diperoleh jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat dari industri dan investasi. Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi baru 5,5 persen dan dinilai masih perlu ditingkatkan hingga 8-9 persen. Oleh karena itulah dengan hasil kesepakatan Blok Cepu, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.⁷⁵

b. Pertemuan antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan Pemerintah

Mantan Presiden B.J. Habibie mengunjungi kompleks Istana Negara, Jakarta bersama lima anggota presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan kemudian bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Perekonomian Boediono, serta Menko Kesra Aburizal Bakrie tersebut, Presiden menyampaikan hasil kesepakatan antara Pertamina dan ExxonMobil dalam pengelolaan kandungan gas serta minyak bumi di Blok Cepu. Di akhir pembicaraan, ICMI menyatakan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.⁷⁶

❖ Penggunaan *Track* Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan oleh *Track*

Bisnis untuk sosialisasi hasil kesepakatan

a. Pertamina melibatkan institusi pendidikan untuk mensosialisasikan hasil kesepakatan

⁷⁵ *Kalla Kritik Penentang Exxon*, Tempo Interaktif, 22 Maret 2006

⁷⁶ *Habibie Bawa ICMI ke SBY*, Jawapos, 23 Maret 2006

Setelah penandatanganan *Joint Operating Agreement*, Pertamina berusaha mensosialisasikan hasil kesepakatan kepada kelompok intelektual melalui Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, seperti yang dilakukan pada tanggal 26 April 2006, di Universitas Indonesia.⁷⁷ Hal ini dikarenakan tugas utama dari komponen pendidikan dari sistem *multi track diplomacy* adalah untuk menghasilkan dan mentransfer informasi mengenai isu yang menjadi permasalahan.

❖ **Penggunaan *Track* Pemerintah untuk meredam resistensi *Track Activism***

a. Jaminan pengawasan dari Pemerintah terkait eksplorasi Blok Cepu untuk menghadapi demonstrasi

Terdapat berbagai demonstrasi yang menentang keberadaan ExxonMobil di Blok Cepu. Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung Barisan Opisisi Rakyat unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Maret 2006, agar Pemerintah menolak intervensi asing dalam perekonomian.⁷⁸ Selain itu, seribu tiga ratus orang dari Komite Perjuangan Pemuda Islam juga melakukan protes ke Cepu untuk menyuarakan penolakan terhadap ExxonMobil.⁷⁹ Warga Bojonegoro sendiri juga menuntut keberadaan ExxonMobil di Blok Cepu. Sekitar 300 warga sekitar sumur minyak Banyuurip dan sumur gas Jambaran, lokasi minyak, unjuk rasa. Mereka

⁷⁷ Hal ini sebagaimana tampak pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta & sekitarnya, Rabu, 26 April 2006 Universitas Indonesia

⁷⁸ *Mahasiswa Malang Tolak Exxon*, www.tempointeraktif.com, 27 Maret 2006

⁷⁹ *Tolak Exxon, Pemuda Islam Solo Konvoi ke Cepu*, www.tempointeraktif.com, 19 Maret 2006

menuntut ExxonMobil transparan dalam mengelola Blok Cepu. Aksi serupa digelar warga Surakarta pada minggu sebelumnya.⁸⁰

Dari sudut pandang masyarakat Bojonegoro, kekhawatiran mengenai hasil kesepakatan pemerintah dengan ExxonMobil dikarenakan masyarakat disekitar Blok Cepu tidak dilibatkan secara langsung dalam proses negosiasi, sehingga keputusan-keputusan cenderung dinilai sepihak dan tertutup. Sementara masyarakat hanya dijadikan sebagai monitoring dari kebijakan pemerintah.⁸¹ Aspirasi dari masyarakat sekitar Blok Cepu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyu Urip Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro disampaikan ke Komisi VII DPR. Pada tanggal 20 Maret 2006, digelar rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno, dan Kepala BP Migas Kardaya Warnika yang dipimpin Ketua Komisi VII Agusman Effendi (F-PG) didampingi Wakil Ketua Sonny Keraf (F-PDIP), Sutan Bhatogana (F-PD), Rapiuddin Hamarung (F-BPD), dan Achmad Farial (F-PPP) diruang rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I. Dalam Raker tersebut, Tyas Indyah Iskandar (F-PG) menyampaikan, DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Aliansi Masyarakat Banyu Urip Bojonegoro menilai yang terpenting adalah segera dilaksanakannya pengelolaan Blok Cepu. Hal senada diungkapkan Denny Sultani Hasan (F-PD). Ia meminta pemerintah untuk segera menjalankan dan memantau kesepakatan yang

⁸⁰ *Warga Bojonegoro Demo Menuntut Exxon*, www.temppointeraktif.com, 20 Maret 2006

⁸¹ *PRAKTEK KULIAH LAPANGAN MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO DALAM KERJASAMA EKSPLORASI MINYAK BUMI ANTARA INDONESIA (PERTAMINA) DENGAN EXXON MOBILE*, Mahasiswa FISIP UNAIR Juni 2006

telah ditandatangani terkait dengan pengelolaan Blok Cepu. Menurutnya dalam pengelolaan Blok Cepu, daerah yang ada disekitarnya sangat mengharapkan pembagian hasil tersebut demi meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menanggapi masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa keuntungan sebesar sepuluh persen bukan hanya untuk Bojonegoro. Dari sepuluh persen, dua per tiga untuk Jawa Timur. Dan dua per tiga untuk Jawa Timur itu dibagi menjadi dua pertiga untuk Kabupaten Bojonegoro dan sepertiga untuk Provinsi Jawa Timur. Dari sepertiga untuk Jawa Tengah, dua pertiga untuk Kabupaten Blora dan sepertiganya untuk Provinsi Jawa Tengah jelas Purnomo.⁸² Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro juga aktif melakukan penyuluhan untuk menjelaskan keuntungan hasil kesepakatan Blok Cepu. Ia juga mengajak anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR mengawasi operasional Blok Cepu, agar eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di Blok Cepu tersebut berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal disekitar lokasi lapangan migas tersebut.⁸³

Pemerintah juga meningkatkan pengawasan dalam proses eksplorasi, untuk meminimalisir kemungkinan adanya penyelewengan operasional. Menteri BUMN Sugiharto menyatakan bahwa pemeriksaan operator Blok Cepu akan

⁸² *Komisi VII minta Pemerintah perhatikan Masyarakat sekitar Blok Cepu*, www.dpr.go.id, 21 Maret 2007

⁸³ *Menteri ESDM Purnomo Ajak Fraksi PPP DPR-RI Awasi Blok Cepu*, www.tempointeraktif.com, Selasa, 11 April 2006

dilakukan tujuh lapis, dan Pemerintah telah bertekad akan melaksanakan mekanisme check and balances di segala bidang. Termasuk adanya audit pengelolaan Blok Cepu yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan BP Migas akan memeriksa Plan of Development yang diajukan oleh operator.⁸⁴

b. Pertemuan Pemerintah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan pengajuan hak angket

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV pasal 12 dan 13 Tata Tertib DPR RI, mempunyai hak:

1. Interpelasi
2. Angket
3. Menyatakan Pendapat

Hak angket digunakan untuk mengetahui kejelasan dan data langkah pemerintah mengenai keluarnya kebijakan strategis pemerintah, yang dinilai memiliki indikasi korupsi atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan angket DPRD merupakan hal yang sangat serius dibanding interpelasi. Karena di dalam angket selain dibentuk panitia khusus yang mempunyai masa kerja maksimal 60 hari, berbagai pihak terkait akan dipanggil

⁸⁴ *Operator Cepu Diawasi Tujuh Lapis*, <http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=149903>, 27 Februari 2007

oleh pansus. Mereka yang dipanggil wajib memenuhi undangan, kalau menolak hadir pansus berhak memaksa dengan bantuan petugas.⁸⁵

Pada tanggal 20 Maret 2006, enam puluh dua anggota DPR dari lima fraksi, yaitu Fraksi PDIP, PAN, PKB, PPP dan PKS menandatangani usulan penggunaan hak angket atas penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Alasan yang disampaikan atas usulan penggunaan hak angket tersebut adalah bahwa perjalanan penyerahan kepemimpinan operatorship lapangan minyak Blok Cepu kepada ExxonMobil mengandung penyalahgunaan wewenang. Sekaligus pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Saat ada pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang semua pimpinan partai, kecuali PDIP, ke Istana Negara, pada bulan Maret 2006. Diawali makan malam, pembicaraan berlangsung hingga tiga jam. Dalam pertemuan itu, Tiffatul Sembiring, Ketua PKS, dan Ade Daud Nasution mempertanyakan permasalahan kesepakatan mengenai Blok Cepu yang dinilai janggal dikarenakan mekanisme perundingan yang tertutup dan tidak ada penjelasan dari pemerintah hingga hasil kesepakatan tercapai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai keuntungan yang akan diperoleh dalam pengelolaan Blok Cepu dengan bentuk Joint Operating Agreement.⁸⁷ Langkah diplomasi pemerintah Indonesia terbukti

⁸⁵ *Hak dan Kewajiban DPR* (Internet). Available from: <
<http://www.dpr.go.id/index.php>> (diakses 1 Juli 2007)

⁸⁶ *62 Anggota DPR Teken Hak Angket Blok Cepu*, www.tempointeraktif.com, 20 Maret 2006

⁸⁷ *Simalakama Investasi Asing*, Majalah Tempo, edisi 27 Maret – 2 April 2006

efektif dengan gagalnya pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai permasalahan Blok Cepu.⁸⁸

Kegagalan DPR dalam menggunakan hak angket Blok Cepu ditentukan melalui mekanisme voting terbuka dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Zaenal Ma'arif (F-PBR), pada tanggal 30 Mei 2006. Dalam voting yang berlangsung terbuka, terdapat tujuh fraksi yang secara tegas menolak digunakannya hak angket Blok Cepu, yaitu Golkar, PPP, Partai Demokrat, PKB, PKS, PBR, dan PDS. Dalam voting tersebut 100 orang Anggota F-PG menolak digunakannya hak angket Blok Cepu, PPP 23 orang anggota, Partai Demokrat 48 orang anggota, PKB 15 orang anggota, PKS 29 orang anggota, PBR 5 orang anggota, dan PDS 7 orang anggota. Sementara itu suara F-PAN terpecah menjadi 3, 20 anggota F-PAN menolak digunakannya hak angket Blok Cepu, 9 orang setuju digunakannya hak angket Blok Cepu, dan 2 orang anggota menyatakan abstain.

Serupa dengan F-PAN, suara F-BPD juga terpecah menjadi dua. Sembilan orang anggota F-BPD menolak digunakannya hak angket dan dua orang setuju digunakannya hak angket Blok Cepu. Dalam voting yang dilakukan terbuka pada Rapat Paripurna DPR yang dalam agendanya hanya membahas hak angket Blok Cepu, hanya F-PDIP yang secara tegas setuju dengan penggunaan hak angket. Tujuh puluh dua orang anggota DPR dari unsur F-PDIP menyatakan setuju dengan hak angket Blok Cepu. Dari tiga ratus empat puluh dua orang Anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna, delapan puluh tiga orang anggota DPR

⁸⁸ DPR gagal gunakan hak angket blok cepu, 31 Mei 2006, www.dpr.go.id

setuju digunakannya hak angket Blok Cepu, dua ratus lima puluh tujuh anggota DPR menolak digunakan hak angket, dan dua orang menyatakan abstain. Dengan demikian DPR gagal menggunakan hak angket terkait dengan penunjukan Exxon Mobil sebagai General Manager Blok Cepu.

III.2.2 Pola Diplomasi ExxonMobil demi menyelesaikan permasalahan

Dalam mencapai kepentingannya, ExxonMobil memiliki beberapa keterbatasan sebagai sebuah perusahaan multinasional, yang masuk ke dalam *track* bisnis. Oleh karena itulah pola diplomasi ExxonMobil juga melibatkan *track* lain untuk menghadapi permasalahan yang ada sebagaimana terurai di bawah ini:

- ❖ **Penggunaan *Track Home Country Government* (Amerika Serikat) untuk berdiplomasi dengan *Track Host Country Government* (Indonesia)**

a. Aktifitas lobi ExxonMobil terhadap pemerintah Amerika Serikat

Tindakan lobi politik yang dilakukan sebuah perusahaan, bertujuan untuk aktif berperan dalam penentuan agenda kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah demi kelancaran usaha perusahaan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses lobi yaitu kemampuan keuangan, kepemilikan koneksi dengan institusi tertentu sebagai sumber informasi, dan sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Dalam permasalahan Blok Cepu, Amerika Serikat sebagai *home country* ExxonMobil turut memiliki peranan penting. Amerika Serikat merupakan negara konsumen minyak terbesar di dunia, dengan tingkat konsumsi sekitar 22 juta barrel/ hari, atau sekitar 25% dari total konsumsi dunia. Oleh karena itu, untuk

kepentingan *security of supply* minyak dalam negeri, politik dan diplomasi luar negeri Amerika Serikat selalu mendukung dan melindungi kepentingan perusahaan minyaknya yang berada di luar negeri. Hal ini dikarenakan walaupun perusahaan minyak Amerika Serikat adalah perusahaan swasta, namun pemerintah Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap manfaat ekonomi berupa pajak, lapangan kerja, dan juga bagi *security of supply* kebutuhan energi Amerika Serikat.⁸⁹ Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa mayoritas sumber energi yang menggerakkan perekonomian global adalah minyak. Selama ini, Amerika Serikat memenuhi lebih dari 50 % kebutuhan minyaknya dari pasar internasional. Oleh karena itu, merupakan sebuah kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mengamankan sumber energi tersebut, melalui kerjasama dengan negara yang kaya akan sumber minyak bumi, demi peningkatan keterbukaan pasar, yang didukung oleh transparansi dan peraturan hukum terkait dengan investasi. Dengan begitu, hal ini akan mengembangkan jangkauan penyedia sumber energi yang akan bermanfaat bagi kebutuhan pasar global, termasuk kebutuhan nasional Amerika Serikat, dan secara bersamaan memberikan keuntungan bagi negara pemilik sumber energi dengan masuknya investasi.⁹⁰

ExxonMobil memiliki kedekatan dengan pemerintah Amerika Serikat, melalui sumbangan dalam dunia politik.⁹¹ Sejak pemilu tahun 2000 dan pemilu tahun 2004, ExxonMobil telah menyumbang 2.800.000 USD kepada Partai

⁸⁹ Dr. Kurtubi, *Implementasi Diplomasi Energi Indonesia dengan Negara-negara Afrika Sub Sahara*. Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Surabaya, 26-27 April 2007

⁹⁰ *The National Security Strategy*, <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf>.

⁹¹ Courtney Mabeus, *Asbestos defendants push for litigation reform*, www.opensecrets.org

Republik.⁹² Sedangkan, dana ExxonMobil yang digunakan untuk lobi pada tahun 2004, adalah sebanyak 7,7 juta USD.⁹³ ExxonMobil mempekerjakan 13 perusahaan lobi dan 105 pegawai lobi, yang kebanyakan dari mereka adalah pegawai pemerintah.⁹⁴ ExxonMobil juga memiliki kekuatan pengaruh dalam institusi bisnis Amerika Serikat. Salah satunya, adalah terpilihnya Edward Galante, senior vice president ExxonMobil sebagai chairman United States Council for International Business (USCIB), sebuah institusi yang mempromosikan perdagangan bebas sekaligus memberikan pandangan kepada para pejabat pembuat kebijakan di seluruh dunia.⁹⁵

Pada tanggal 7 November 2005, Lee R Raymond, chairman dan chief executive officer ExxonMobil, pada Annual Award Dinner yang diselenggarakan oleh USCIB, menyatakan bahwa perolehan akses akan sumber energi merupakan sebuah permasalahan kolektif, yang juga harus diselesaikan secara kolektif. Hal ini dapat dilakukan apabila pemerintah Amerika Serikat turut aktif memperkuat kerjasama dengan pemerintah negara lain yang memiliki sumber energi.⁹⁶ Kemudian pada tanggal 9 November 2005, Lee R Raymond memberikan kesaksian di depan kongres Amerika Serikat mengenai tingginya harga minyak. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa walaupun ExxonMobil bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan minyak kepada masyarakat, tetapi

⁹² *Center for Responsive Politics*. <http://www.opensecrets.org>

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Greenpeace, "Exxon Money 2004 Key Facts," *fact sheet*, <http://usaphoto.greenpeace.org/exxonmobil-secrets/exxon%20money%202004%20key%20facts.doc>, 30 Juni 2005

⁹⁵ *Edward Galante of Exxon Mobil Elected Vice Chair of USCIB*, www.uscib.com, 23 April 2004

⁹⁶ *Annual Award Dinner, Remarks by Lee R Raymond on accepting USCIB's International Leadership Award*, www.exxonmobil.com/target

keterbatasan kesempatan investasi membuat akses terhadap minyak juga menurun. Oleh karena itulah, ia meminta Kongres untuk turut aktif meningkatkan iklim investasi global di bidang energi.⁹⁷

b. Aktifitas diplomasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia

Melalui kedekatannya dengan pemerintah Amerika Serikat, maka diplomasi ExxonMobil terhadap Indonesia juga akan lebih mudah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pemerintah Indonesia memiliki ketergantungan secara ekonomi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1999, nilai ekspor Amerika Serikat ke Indonesia mencapai 2 milyar USD, sedangkan nilai impor Amerika Serikat ke Indonesia senilai 9,5 milyar USD. Bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Indonesia, dikoordinasikan melalui Consultative Group on Indonesia yang dibentuk pada tahun 1989, yang terdiri dari 19 negara donor dan 13 organisasi internasional. Selain itu, *U.S. Agency for International Development* (USAID) telah memberikan bantuan dalam proses pembangunan nasional sejak tahun 1950. Dalam menghadapi krisis ekonomi, USAID menyediakan konsultan teknis dalam hal membantu proses implementasi reformasi ekonomi dan desentralisasi fiskal, serta mendukung perkembangan aktifitas demokrasi dan civil society melalui organisasi non pemerintah. USAID juga memberikan sumbangan sebanyak 20 juta USD kepada Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Duta Besar Amerika Serikat, B Lynn Pascoe, menyatakan bahwa sumbangan tersebut diberikan untuk pengembangan sistem pengadilan

⁹⁷www.ipaa.org/news/wr/WR-2005

1115.pdf+lee+raymond,+congress,+energy,+november+2005&hl=id&ct=clnk&cd=7&gl=id

yang penting demi memperbaiki iklim investasi.⁹⁸ Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Lynn Pascoe, juga menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kemitraan perdagangan yang sehat dan strategis. Total volume perdagangan antara kedua negara mencapai 15 milyar dolar pada 2005, termasuk 12 milyar dolar dalam ekspor Indonesia. Sedangkan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Sudjadhan Parnohadiningrat, dalam laporan tertulis menyatakan bahwa kalangan pengusaha AS mempunyai komitmen besar untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu pilihan untuk melakukan investasi. Saat ini terdapat lebih dari 300 perusahaan AS yang telah melakukan investasi di Indonesia dengan total investasi lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat. Selama ini, Amerika Serikat merupakan investor asing terbesar urutan kesembilan.⁹⁹

Diplomasi pemerintah Amerika Serikat, dapat dilihat pada saat pertemuan bilateral di sela konferensi di Santiago, Chili, tanggal 24 November 2004, Presiden Amerika Serikat, George W Bush, meminta pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan kembali beberapa kontrak minyak dan gas bumi, termasuk Blok Cepu. Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan untuk mengevaluasi kembali kontrak tersebut dan meningkatkan kerjasama tersebut bila hasil evaluasinya positif. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, dan juga Pertamina,

⁹⁸ Siti Maemunah, *Rakyat harus siap menghadapi badai*, Majalah Forum No.22, 25 September 2005

⁹⁹ *A.S. dan Indonesia Canangkan Kerjasama Bagi Peningkatan Perdagangan dan Pencegahan Tindak Kejahatan*.(2006). (Internet). Siaran Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Available from: <<http://jakarta.usembassy.gov/bhs>>(diakses 1 Juli 2007)

untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan pihak ExxonMobil pada tanggal 26 November 2004.¹⁰⁰

Selain itu, pada kunjungannya ke Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkesempatan untuk menemui Presiden Gorge W Bush, wakil presiden Amerika Serikat, Dick Cheney. Menurut Abdilah Toha, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, yang turut dalam rombongan, Wakil Presiden Amerika Serikat, Dick Cheney dan juga Menteri Keuangan Amerika Serikat, John Snow, bertanya mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Blok Cepu.¹⁰¹ Dino Pati Djalal menyampaikan statemen resmi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan US Asian Business Council dan juga bertemu dengan sejumlah perusahaan terkemuka AS seperti dari perusahaan ExxonMobil, Merryl Lynch, Conoco, dan Phillip Morris. Presiden Yudhoyono juga mengadakan pertemuan dengan pimpinan senat dan kongres AS di Gedung Capitol Hill dan kemudian dilanjutkan dengan dialog bilateral soal energi di Old Executive Building. Setelah itu, Presiden Yudhoyono bertemu dengan Presiden AS George W Bush di Ruang Oval, Gedung Putih dan menghadiri resepsi dan diskusi pada forum United States Indonesia Society.¹⁰²

Hal penting lainnya adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice sehari sesudah penandatanganan JOA Pertamina dan ExxonMobil, oleh beberapa kalangan diasumsikan sebagai pemicu dipercepatnya penandatanganan JOA tersebut, karena penandatanganan dilakukan 5 hari setelah

¹⁰⁰ *Presiden Bush Minta Indonesia Efektifkan Kontrak-Kontak Migas*, Tempo, 25 November 2004

¹⁰¹ Teddy Anggoro, loc.cit

¹⁰² *Kunjungan Presiden SBY ke USA*, Antara news agency, Jakarta, in English 6 May 05

pengangkatan Arie Sumarno sebagai Direktur Utama Pertamina padahal sampai hari pengangkatan tersebut, Direktur Pertamina Widya Purnama yang digantikan Arie Sumarno, menyatakan bahwa Pertamina masih akan bertahan untuk menawarkan opsi bergantian menjadi *Lead Operator* selama 5 tahun di Blok Cepu. Condoleezza Rice sendiri menyatakan bahwa kedatangannya tidak berhubungan dengan hak eksplorasi ExxonMobil di Blok Cepu, melainkan hanya untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, karena hal tersebut merupakan permasalahan bisnis yang ditentukan perekonomian pasar global. Walaupun begitu, ia mengakui bahwa salah satu pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah mengamankan sumber energi dari luar, dan memenuhi permintaan minyak tingkat nasional. Bahkan, National Energy Policy Development Group menyatakan bahwa ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak pada tahun 2020, akan mencapai 66%. Ia memandang investasi perusahaan multinasional Amerika Serikat di Indonesia pada bidang minyak adalah sebuah langkah yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri, dan juga pasar global yang membutuhkan minyak sebagai sumber energi.¹⁰³

❖ Penggunaan *Track* Bisnis

a. Peran *United States and Indonesia Society*

Dalam lobi terhadap pemerintah Indonesia, ExxonMobil juga memanfaatkan keberadaan institusi *United States and Indonesia Society* (USINDO). Hal ini dapat dilihat dari sikap USINDO yang selalu memberikan statemen mengenai

¹⁰³ Interview on RCTI TV with Yulia Supadmo Secretary Condoleezza Rice Jakarta, Indonesia March 15, 2006 <http://www.state.gov/>

pentingnya investasi asing bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah pernyataan Wakil Direktur USINDO, Edward Masters, dalam menyikapi banyaknya demonstrasi yang menentang keberadaan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. Ia berkata bahwa resistensi akan perusahaan Amerika Serikat dalam kasus Exxon, akan mempengaruhi minat para investor untuk tidak berinvestasi di Indonesia, dan akan lebih memilih negara lain seperti Vietnam, atau Cina.¹⁰⁴ Dalam kebijakan informasi publik dan penelitian kebijakan, ExxonMobil mendukung promosi akan pembuatan kebijakan oleh pejabat mengenai perdagangan global, seperti memberikan dana bagi institusi seperti United States Council for International Business, International Chamber of Commerce and the National Foreign Trade Council. Pada tahun 2002, ExxonMobil memberikan sumbangan sebesar 50.000 USD kepada USINDO.¹⁰⁵

USINDO sendiri adalah sebuah institusi yang dibentuk sejak tahun 1994 untuk mengembangkan saling pengertian antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sejarah, kebudayaan, dan hubungan bilateral. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah, media, kelompok bisnis, kelompok ahli, dan juga masyarakat umum, di kedua belah negara. USINDO memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia dikarenakan jajaran pengurusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki akses ke pemerintahan. Diantaranya, Honorary Co-Chairs yang ditempati oleh Ali Alatas, Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Board of Trustees yang ditempati oleh Ade Nasution dan Theo L Sambuaga, anggota

¹⁰⁴ <http://indonesische-botschaft.de/web-versi-indonesia/in/kbri/berlin/antara/maret/24a.rtf>

¹⁰⁵ PDF 5909_2002.giving.report, *Public Information and Policy Research*, www.exxonmobil.com

Dewan Perwakilan Rakyat, Widjojo Nitisastro, Mantan Menteri Pembangunan Ekonomi Nasional, Sanyoto Sastrowardoyo, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Shinta Widjaja, Ketua Komite Perdagangan Internasional, Kamar Dagang Indonesia. Dari pihak pemerintah Amerika Serikat, terdapat Matt Daley, Presiden US- ASEAN Business Council, Bennett Johnston, Jr, mantan anggota Senat Amerika Serikat, Wayne Forrest, Direktur Eksekutif American Indonesian Chamber of Commerce, dan juga Mark Sikkel, Vice President, Asia Pacific/Middle East ExxonMobil Corporation.

Lobi ExxonMobil juga difasilitasi oleh USINDO melalui jamuan makan malam bersama pada bulan Maret 2006. Acara yang diselenggarakan di hotel Ritz Charlton tersebut dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Lynn B Pascoc, pimpinan ExxonMobil, Freeport dan Newmont. Dari pemerintah Indonesia tampak hadir Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, ketua Kadin M.S. Hidayat.¹⁰⁶ Dari pertemuan tersebut, ExxonMobil berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para pembuat kebijakan, baik secara langsung kepada pemerintah Indonesia, ataupun melalui perantara pemerintah Amerika Serikat dan institusi bisnis semacam USINDO.

❖ **Penggunaan *Track Media* dan Komunikasi untuk mendekati masyarakat Indonesia**

a. Peran *Public Relations* ExxonMobil

¹⁰⁶ *Simalakama Investasi Asing*, Majalah Tempo, edisi 27 Maret – 2 April 2006

Berbagai statemen resmi yang dikeluarkan oleh pihak hubungan masyarakat ExxonMobil ditujukan sebagai langkah persuasive menghadapi masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai publikasi ExxonMobil melalui juru bicaranya mengenai dampak positif kehadiran ExxonMobil bagi pembangunan masyarakat lokal. Pada tanggal 13 Desember 2004, Presiden ExxonMobil Rex W Tillerson, menyampaikan pidato di Konferensi BIEM di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa ExxonMobil telah memberikan kontribusi kepada Palang Merah Indonesia dan beberapa kelompok non pemerintah untuk membantu proses penanganan bencana alam. Selain pengalaman operasi di Indonesia selama sekitar 100 tahun, ExxonMobil juga telah menanamkan investasi sebesar 17 miliar USD. Hal ini juga didukung oleh penggunaan ribuan tenaga kerja Indonesia yang mencapai 96% jumlah seluruh pegawai ExxonMobil Indonesia, pembangunan sekolah dan rumah sakit, serta transfer teknologi, di wilayah lokal tempat ExxonMobil beroperasi. ExxonMobil juga menekankan bahwa keberhasilan penemuan sumber minyak baru, dikarenakan perkembangan teknologi baru, yaitu survey seismic tiga dimensi. Oleh karena itu, ExxonMobil menghimbau pemerintah Indonesia untuk menyediakan insentif bagi perusahaan yang dapat menyediakan sumber teknis, keuangan, dan manajemen untuk mengambil resiko eksplorasi. Terkait dengan Blok Cepu, ExxonMobil menyatakan bahwa sumber minyak yang ditemukan di sumur Banyu Urip 3 adalah berkat system survey seismic tiga dimensi.¹⁰⁷ ExxonMobil juga turut membangun masyarakat lokal Bojonegoro, salah satunya

¹⁰⁷ *Remarks by Rex W. Tillerson, President, ExxonMobil Corporation BIEM Conference, Jakarta, Indonesia December 13, 2004*

melalui bantuan bagi pembangunan sekolah lokal.¹⁰⁸ Selain itu, ExxonMobil juga menjanjikan multiplier effect senilai 3 – 8 juta USD.

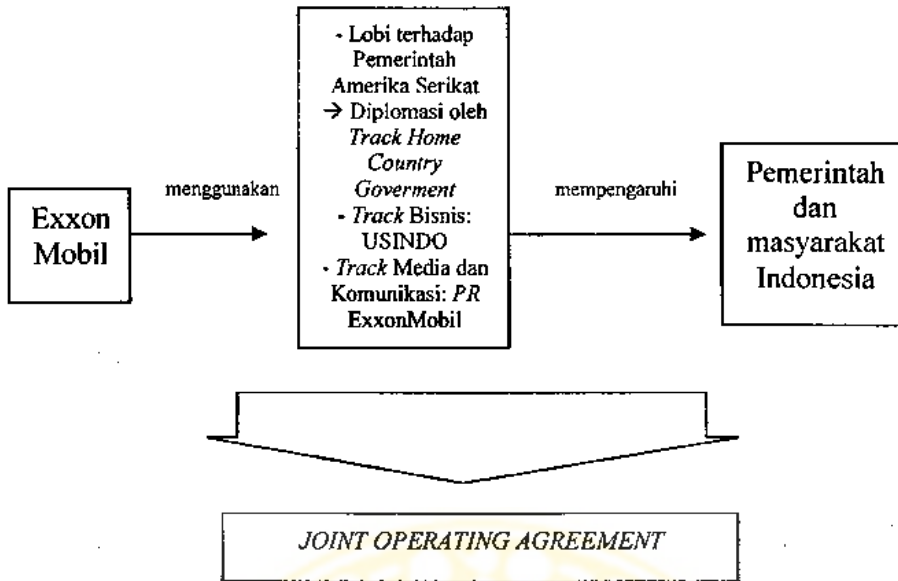
Juru bicara ExxonMobil Indonesia, Deva Rachman, menyatakan multiplier effect akan terwujud dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan program pembangunan.¹⁰⁹ ExxonMobil sendiri memiliki program untuk mengembangkan program Public Relations, pada tahun 2005. Kampanye baru perusahaan tersebut ditekankan kepada usaha untuk mensosialisasikan mengenai seluk-beluk perusahaan industri minyak. Kampanye akan dilakukan melalui iklan, dan tur media, serta program public relations sendiri. ExxonMobil juga melakukan kampanye tersebut di media lokal tempat perusahaan tersebut berada.¹¹⁰ Program ini dilakukan ExxonMobil untuk meredam penolakan masyarakat Indonesia, melalui penekanan sosialisasi akan dampak positif ExxonMobil bagi kesejahteraan nasional. Secara keseluruhan, pola diplomasi ExxonMobil dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar 3.3: Langkah Diplomasi ExxonMobil

¹⁰⁸ www.pemkabbojonegoro.co.id

¹⁰⁹ *Cepu Block development to create 3-8 billion dollars in multiplier effect*, Antara News, 14 Maret 2006

¹¹⁰ www.exxonmobil.com



III.3 Analisa Proses Diplomasi Indonesia – ExxonMobil

Dalam proses perundingan, terdapat beberapa langkah diplomasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan melibatkan beberapa *track* dalam sistem *multitrack diplomacy*, dalam prosesnya untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak. Pola diplomasi yang terjadi antara Indonesia – ExxonMobil dalam proses penetapan kontraktor Blok Cepu, rentang waktu November 2004 – Mei 2006, melibatkan interaksi antar *track* yang terwujud dalam pertemuan perundingan, lobi, dan juga penggunaan *track* untuk meredam resistensi dari *track* lain sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 di bawah ini:



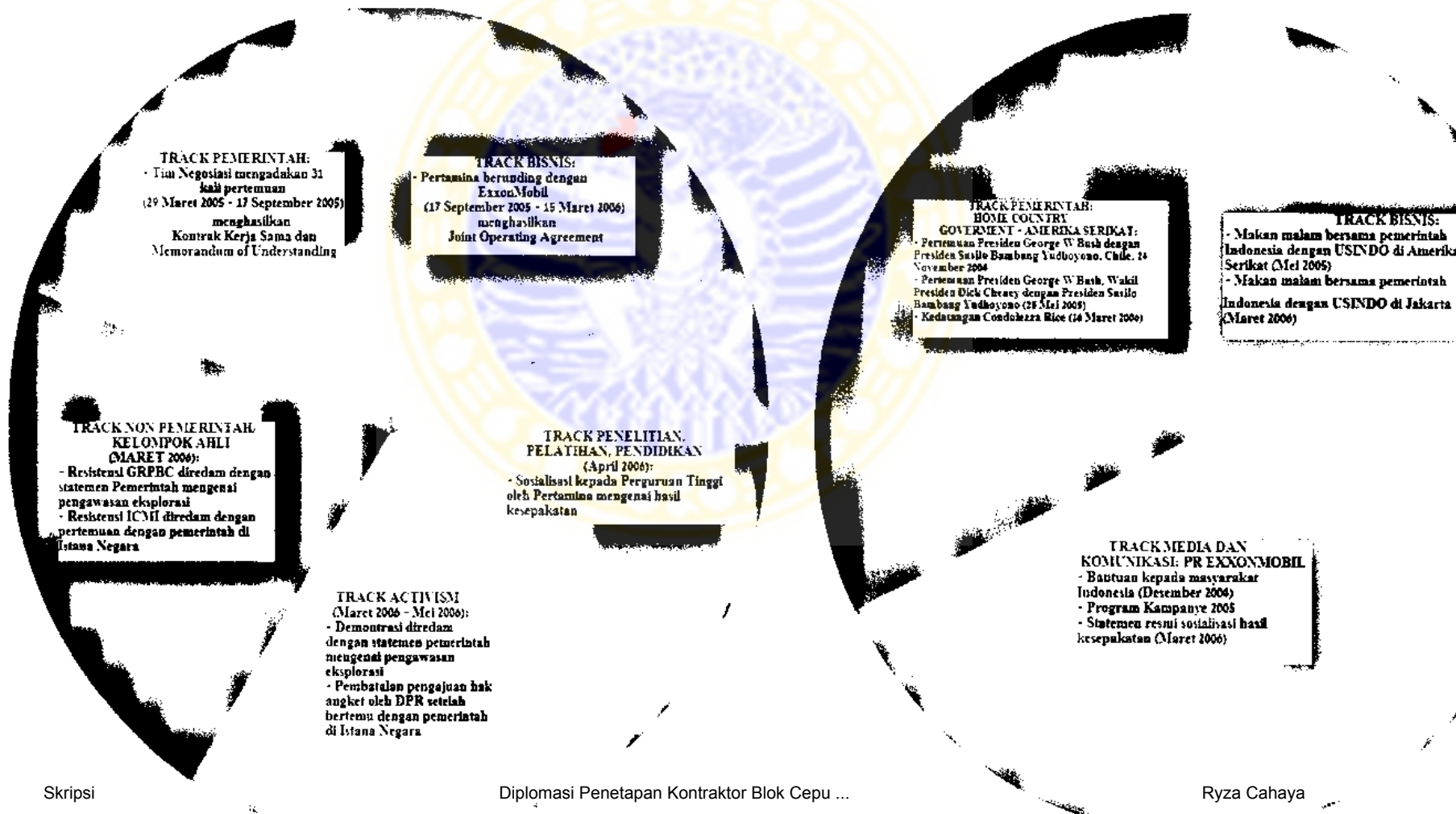
- Kepentingan Indonesia:**
- Pemenuhan kebutuhan Energi nasional
 - Investasi asing

- Kepentingan ExxonMobil:**
- Perolehan akses untuk mengelola sumber faktor produksi

- Permasalahan:**
- Keinginan kedua belah pihak untuk mendapatkan pembagian hasil, *participating interest*, dan hak operator yang menguntungkan
 - Terhentinya proses perundingan setelah penandatanganan *Head of Agreement*
 - Resistensi akan hasil kesepakatan yang tercapai

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA

UPAYA DIPLOMASI EXXONMOBIL



Pihak Indonesia menggunakan lima *track* dari sembilan *track* yang ada dalam pola *multitrack diplomacy*. *Track* yang tidak digunakan adalah *Track* Komunitas Agama, *Track* Pendanaan, *Track* Warga Negara, dan *Track* Media dan Komunikasi. Sedangkan pihak ExxonMobil menggunakan tiga *track* dari sembilan *track*, yaitu hanya *track* Pemerintah, *track* bisnis, dan *track* media dan komunikasi. Langkah diplomasi yang diambil oleh Indonesia ataupun ExxonMobil ditekankan untuk mencapai kepentingan mereka dan menyelesaikan kendala yang timbul dalam proses negosiasi.

Dalam pola *multi-track diplomacy*, diplomasi akan berjalan lebih efektif apabila semua *track* yang ada ikut dilibatkan, hal ini dikarenakan aspek permasalahan juga dinilai amat kompleks. Pada penetapan kontraktor Blok Cepu, kedua belah pihak hanya melibatkan *track* yang mendesak sebagai upaya menyelesaikan kendala yang muncul dalam perundingan. Pihak Indonesia baru melibatkan kelompok ahli dan sosialisasi ke perguruan tinggi, setelah adanya resistensi dari masyarakat Indonesia mengenai hasil kesepakatan. Dapat diperkirakan bahwa apabila pihak-pihak tersebut dapat dilibatkan sejak awal, maka skala resistensi dapat diperkecil, karena adanya transparansi akan mengurangi kecemasan masyarakat akan adanya kemungkinan penyelewengan. Sedangkan dalam langkah diplomasi ExxonMobil sebagai sebuah perusahaan multinasional, ternyata masih tetap amat sangat mementingkan peranan *home country government*, yaitu pemerintah Amerika Serikat untuk juga turut aktif berdiplomasi dengan pemerintah Indonesia mengenai penetapan kontraktor Blok Cepu. Dalam perkembangan dunia internasional dimana peranan negara bangsa

seringkali dinilai mengalami penurunan, ternyata diplomasi antara pemerintah dengan pemerintah masih merupakan hal yang utama.

Walaupun begitu, yang perlu diperhatikan adalah terlihat adanya perbedaan kekuatan dalam *track* pemerintah, saat pemerintah Indonesia berdiplomasi dengan pemerintah Amerika Serikat sebagai *home country* ExxonMobil. Proses perundingan yang sebelumnya terhenti sejak penandatanganan *Head of Agreement* di masa pemerintahan Presiden Megawati, kembali bergulir setelah Presiden Amerika Serikat George W Bush mempertanyakan kelanjutan kontrak ExxonMobil di Blok Cepu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada bulan November 2004. Hal ini juga didasari oleh adanya ketergantungan pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga, meskipun pihak ExxonMobil memberdayakan lebih sedikit *track* dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, tetap mampu mendapatkan hasil kesepakatan yang optimal. Indonesia sendiri tidak dapat terlalu menekan pihak ExxonMobil demi menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses perundingan. dikarenakan pada kenyataannya Indonesia tidak memiliki modal, teknologi, dan tenaga ahli yang setara dengan pengalaman ExxonMobil sebagai sebuah perusahaan multinasional global. Dalam proses sebuah diplomasi, kesepakatan yang dihasilkan akan lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak apabila saat melakukan perundingan, mereka memosisikan diri dalam kesetaraan. Langkah diplomasi Indonesia menjadi tidak terlalu optimal tanpa adanya kesamaan posisi.

BAB IV

KESIMPULAN

Diawali pada bulan Juni 2000, Blok Cepu yang sebelumnya dikelola oleh PT Humpus Patragas, beralih menjadi milik ExxonMobil, sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 2001, cadangan minyak baru ditemukan di Sumur Banyu Urip 3, yang menyebabkan ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak yang sebelumnya harus berakhir pada tahun 2010. Walaupun, telah terjadi kesepakatan dalam *Head of Agreement* pada bulan Juni 2004, namun proses perundingan tidak dilanjutkan, hingga turunnya instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan November 2004, agar Pertamina segera mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan Blok Cepu dengan ExxonMobil.

Terdapat banyak permasalahan saat proses perundingan berlangsung dikarenakan perundingan sempat terhenti dan kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya pembagian hasil, *participating interest*, dan hak operator yang menguntungkan. Hal ini kemudian diselesaikan dengan upaya diplomasi dengan dibentuknya Tim Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan Kontrak Kerja Sama. Perundingan menuju *Joint Operating Agreement* dirundingkan dalam kesepakatan bisnis antara Pertamina dan ExxonMobil. Sedangkan resistensi yang timbul dari kelompok *activism* dalam bentuk demonstrasi – demonstrasi yang berujung pada pengajuan hak angket oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta resistensi dari kelompok ahli yang terdiri dari Gerakan Rakyat Penyelamat

Blok Cepu, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, diredam dengan adanya pertemuan dengan pihak pemerintah untuk menjelaskan mengenai adanya pengawasan dalam proses eksplorasi Blok Cepu dan keuntungan hasil kesepakatan bagi pembangunan nasional. Sedangkan, dari pihak ExxonMobil, langkah diplomasi terkait penetapan kontraktor Blok Cepu, melibatkan *track* pemerintah Amerika Serikat, kelompok bisnis dari *United States and Indonesia Society*, dan juga *track* media dan komunikasi sebagai sarana sosialisasi *brand image* perusahaan kepada masyarakat Indonesia.

Dalam penetapan kontraktor Blok Cepu, hasil kesepakatan akhirnya menunjuk ExxonMobil sebagai operator utama, sedangkan Pertamina menjadi ketua dalam Komite Operasi Bersama sebagaimana diatur dalam *Joint Operating Agreement*. Dalam permasalahan komposisi *participating interest*, ditetapkan 85 % untuk pemerintah dan 15 % operator, lalu dari 15 % tersebut dibagi lagi 45 % Exxon ($45\% \times 15\% = 6,75\%$), 45% ($45\% \times 15\% = 6,75\%$) Pertamina, dan 10 % ($10\% \times 15\% = 1,5\%$) Pemda Jatim dan Jateng, yang didapat secara proporsional dari Exxon dan Pertamina. Pembagian hasil bagi pemerintah pusat 60 %, Pertamina 20 % ($50\% \times 40$), Exxon 20 %, berdasar sistem *adjusted split*. Pembagian berdasarkan sistem *adjusted split* berarti pembagian hasil akan berubah sesuai dengan harga minyak di pasar internasional. Posisi tawar Indonesia pada dasarnya lemah dikarenakan ExxonMobil memiliki modal, tenaga ahli, dan teknologi yang lebih unggul. Terlebih lagi, ExxonMobil melakukan lobi kepada pemerintah Amerika Serikat untuk turut memperjuangkan kepentingan ExxonMobil. Hal ini membuat diplomasi Indonesia tidak dapat terwujud

maksimal mengingat ketergantungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Walaupun hingga kini, Blok Cepu masih belum berproduksi dan muncul permasalahan baru mengenai permintaan, Pertamina untuk mempercepat pengembangan gas Cepu¹¹⁰, namun secara keseluruhan diplomasi dalam penetapan kontraktor Blok Cepu antara Indonesia – ExxonMobil telah dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak dan menyelesaikan kendala yang timbul dalam proses perundingan.

Sebagai penutup, ada beberapa saran yang ingin dikemukakan untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penelitian lebih lanjut dapat mengambil aspek aktor yang berperan dalam proses diplomasi negara dengan perusahaan multinasional, dikarenakan kompleksitas yang tidak hanya melibatkan kalangan diplomat profesional tetapi juga melibatkan pelobi bisnis.
2. Perlunya penelitian mengenai pola *state firm diplomacy*, dikarenakan tidak adanya pola baku dalam proses diplomasi tersebut. Penggunaan *track* dalam *multitrack diplomacy* juga tidak selalu dilibatkan secara keseluruhan. Pendekatan untuk menelaah diplomasi antara perusahaan multinasional dengan pemerintah suatu negara, perlu mengintegrasikan ilmu ekonomi (dalam bidang *experimental economics*) dan juga ilmu negosiasi (dalam isu *negotiation research*).

¹¹⁰ ExxonMobil tolak Pertamina Produksi Gas Cepu, PBH Migas, www.bphmigas.go.id/kbphbbm/login.jsp, diakses 18 Maret 2007

SUMBER BUKU dan HAND OUT SEMINAR

- Asian Development Bank. (2005). *Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki iklim investasi di Indonesia*, Asian Development Bank. Jakarta.
- Baylis, John. (2001). *The Globalization of World Politics*. Oxford University Press. New York.
- CSIS. (2001). *The Indonesian Nation Hood And Challenge of Globalization*. National Library Of Indonesia. Jakarta.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (26-27 April 2007). *Peluang Kerja Sama Energi dengan Negara-negara Afrika Sub-Sahara: Manfaat Jangka Panjang bagi kepentingan nasional Indonesia*. Seminar Kelompok Ahli: Diplomasi Energi Indonesia. Surabaya.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Reading, Mass, Addison-Wesley. Wokingham England.
- Dr. Kurtubi. Surabaya, (26-27 April 2007). Implementasi Diplomasi Energi Indonesia dengan Negara-negara Afrika Sub Sahara, Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES). Seminar Kelompok Ahli: Diplomasi Energi Indonesia. Surabaya.
- Evans, Grahams dan Jerry Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: The Penguin Group.
- Jackson, Robert. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. terj. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Jensen, Nathan. (2006). *Nation-States and the Multinational Corporation: A Political Economy of Foreign Direct Investment*, Princeton University Press. England.
- Landsberg, Hans. (1968). *Energy In the United States : Sources, Uses, And Policy Issues*. American Book Stratford Press. New York.
- Mahasiswa FISIP UNAIR. (2006). *PRAKTEK KULIAH LAPANGAN MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO DALAM KERJASAMA EKSPLORASI MINYAK BUMI ANTARA INDONESIA (PERTAMINA) DENGAN EXXON MOBILE*. Mahasiswa FISIP UNAIR. Surabaya.
- Melissen, J. (1999). *Innovation in Diplomatic Practice*, Macmillian Press. Basingstoke.
- Mas' oed, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta.

PT Pertamina. (2006). *Production Sharing Contract Block Cepas*. Adiposentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta & sekitarnya, Rabu, 26 April 2006 Universitas Indonesia.

Prof. Dr. Subroto. (26-27 April 2007). *Diplomasi Energi Indonesia dengan negara-negara kawasan Afrika Sub Sahara: Tinjauan kritis terhadap manfaatnya bagi kepentingan nasional*. Seminar Kelompok Ahli: Diplomasi Energi Indonesia. Surabaya.

Pareira, Andre. (1999). *Perubahan Global dan perkembangan studi hubungan internasional*. Parahyangan Centre for International Studies. Bandung.

Singarimbun, Masry dan Sofian Effendi (ed). (1989), *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta

Suherman, Ade. (2002). *Organisasi internasional dan integrasi ekonomi regional*. Ghalia Indonesia. Bandung.

Westra, Paridjata. (2001). *Pedoman Penulisan Skripsi Berdasarkan Penelitian empiris di lingkungan perguruan tinggi*. Airlangga University Press. Surabaya.

SUMBER KORAN DAN MAJALAH

(2006). Ada Apa dengan Iklim Investasi Indonesia. *Suara Karya*. 16 Januari. Hal. 5.

(2006). Awas salah pilih Dirut Pertamina. *Rakyat Merdeka*. 4 Maret. Hal.f.

Rizal Malarangeng. (2006). Blok Cepu, Mission Accomplished. *TEMPO* 05/XXXV/27 Maret - 2 April. Hal 46-47.

Tukar guling Blok Cepu disepakati Juni 2005, Pertamina tak ikut teken MoU, *Bisnis Indonesia*, 20 Maret 2006. Hal 14

Surat Terbuka untuk Presiden SBY. *Rakyat Merdeka*. 19 April 2006. Hal 2

SUMBER INTERNET

Aloysius Gunadi Brata.(2006). *Sumber Kuasa Korporasi*. Kompas, www.kompas.co.id.<diakses 20 Maret 2006>

Buyung Wijaya Kusuma. (2004). *Jangan Panik! Produksi minyak Indonesia turun dan impor naik*. Kompas. <http://www.kompas.co.id>. <diakses 8 Desember 2006>

Dr. Louise Diamond and Ambassador John Mcdonald.(1996). *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*. www.imtd.org.<diakses tanggal 11 Februari 2007>

Grace Nirang and Clare Leow, (2005). *Indonesia may become an oil importer as output slides*, Energy Bulletin, www.energybulletin.net.<diakses 11 Desember 2006>

Greenpeace, *Exxon Money 2004 Key Facts fact sheet*, (2004). GreenPeace. <http://usaphoto.greenpeace.org/exxonmobil-secrets/exxon%20money%202004%20key%20facts.doc>.<diakses 11 April 2007>

Indroyono Soesilo. (2006). *Mencari Migas Semakin Canggih*. Kompas. www.kompas.co.id.<diakses 24 November 2006>

PDF 5909_2002.giving.report, *Public Information and Policy Research*, http://www.environmentaldefense.org/documents/5909_2002.giving.report.pdf.<diakses 22 Februari 2007.

PDF *The Outlook for Energy to 2030*. www2.exxonmobil.com/corporate/files/corporate/energyoutlook.pdf.<diakses pada tanggal 21 Desember 2006>

PDF Susan Strange. "*States, Firms, and Diplomacy*." This is an edited text of an article which first appeared in *International Affairs*, London, Vol. 68, no. 1 January 1992, pp. 1-15, and is reproduced with permission.<diakses 22 Februari 2007>

PDF Pedro Conceição Parreira, *Some considerations about the state of the art of the "new economic diplomacy"*, <http://www.diplomacy.edu/conferences/MFA/papers/parreira.pdf>.<diakses 22 Juni 2007>

PDF Ritva Kivikkokangas, *Lecture course on Globalisation from global and local perspectives*, Sandgren, Spring 2005, http://www.helsinki.fi/geography/development_geography/what_is_globalisation.pdf.<diakses 22 Juni 2006>

PDF, *Foreign Direct Investment: A Lead Driver for Sustainable Development?*, Towards Earth Summit 2002 Economic Briefing Series No. 1, <http://www.stakeholderforum.org/policy/economic/fdi.pdf>.<diakses 22 Juni 2006>

Pertamina,(2006) *Exxon Cepu deal "long way off"*.Koran The Jakarta Post, www.thejakartapost.com.<diakses 16 Maret 2006>

Siti Maemunah.(2005). *Rakyat harus siap menghadapi badai*, Majalah Forum No.22, www.google.com.<diakses 25 September 2006>

Teddy Anggoro. *Kajian Kritis Terhadap Permasalahan Hukum yang timbul dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (Studi Kasus ExxonMobil Oil Indonesia sebagai Lead Operator Blok Cepu)*.http://www.thcceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=71.<diakses 2 Februari 2007>

- ExxonMobil tolak Pertamina Produksi Gas Cepu.* (2007). www.bphmigas.go.id/kbphm/berita/berita.asp. <diakses 29 Maret 2007>
- Blok Cepu Masih Gagal.* (2006). Kompas. <http://www.kompas.co.id>. <diakses 11 Februari 2007>
- Blok Cepu ditarget 100 hari.* (2006). Kompas. <http://www.kompas.co.id>. <diakses 11 Februari 2007>
- Cepu Block development to create 3-8 billion dollars in multiplier effect,* (2006). Antara News. <http://www.antara.co.id/>. <diakses 18 Maret 2007>
- Courtney Mabeus, Asbestos defendants push for litigation reform,* (2004). Open Secrets. www.opensecrets.org. <diakses 18 Maret 2007>
- PDF Impor BBM 2006 baru.* (2007). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Website. www.mesdm.net. <diakses 20 Mei 2007>
- DPR gagal gunakan hak angket blok cepu,* (2006). www.dpr.go.id. <diakses 12 Januari 2007>
- Enam Puluh Dua Anggota DPR Teken Hak Angket Blok Cepu,* (2006). www.tempointeraktif.com. <diakses 20 Maret 2006>
- Edward Galante of Exxon Mobil Elected Vice Chair of USCIB,* (2004). www.uscib.com, <diakses 10 Januari 2007>
- ExxonMobil and Pertamina Sign Joint Operating Agreement for Cepu Block,* (2006). Business Wire, www.exxonmobil.com. <diakses 10 Januari 2007>
- ExxonMobil jadi Operator Cepu,* (2006). Kompas, www.kompas.co.id, <diakses 14 Maret 2006>
- Foreign Direct Investment,* (2004). United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org. <diakses 11 Februari 2007>
- Habibie Bawa ICMI ke SBY,* (2006). Jawapos, www.jawapos.com. <diakses 23 Maret 2006>
- Ketersediaan Cadangan Minyak Indonesia.* (2006). Indonesia Energy Information Center – INDENI. www.indeni.org. <diakses 13 Maret 2007>
- Iklim investasi perlu diperbaiki.* Kompas. (2004). www.kompas.co.id. <diakses tanggal 24 November 2006>
- Interview on RCTV with Yulia Supadmo Secretary Condoleezza Rice* (2006). Jakarta, Indonesia March 15, 2006 <http://www.state.gov/>. <diakses 4 Maret 2007>

- Joint Operation Agreement Masuki Babak Akhir*, (2006).Pertamina.www.pertamina.com, <diakses 20 Februari 2006> ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
- Komisi VII minta Pemerintah perhatikan Masyarakat sekitar Blok Cepu*. (2006).DPR, www.dpr.go.id.<diakses 21 Maret 2007>
- Menteri ESDM Purnomo Ajak Fraksi PPP DPR-RI Awasi Blok Cepu*. (2006).www.tempointeraktif.com, <diakses 11 April 2006>
- Mahasiswa Malang Tolak Exxon*, (2006). www.tempointeraktif.com, <diakses 27 Maret 2006>
- OECD Foreign Investment Conference. Paris. (2002). *Indonesia's Experience, Mining and copper 1990-2000, International Copper Study Group*, www.icsg.org.<diakses 10 Februari 2007>
- Operator Cepu Diawasi Tujuh Lapis*. (2006).Kaltim Post, <http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=149903>.<diakses 10 Maret 2007>
- Pertamina janji selesaikan masalah Cepu bulan ini*, (2006).Tempo interaktif, www.tempointeraktif.com<diakses 5 Desember 2006>
- Pemegang posisi operator di Blok Cepu ditentukan oleh lima kriteria*. (2006).Indo Pos, www.google.com, <diakses 5 Maret 2006>
- Pendapatan Blok Cepu 3,3 Miliar Dollar AS Per Tahun*, (2006).Kompas, www.kompas.co.id, <diakses 16 Maret 2006>
- Perbankan siap danai Blok Cepu*. (2005). Tempo.www.tempointeraktif.com.<diakses 8 Oktober 2006>
- Presiden Bush Minta Indonesia Efektifkan Kontrak-Kontak Migas*, (2004).Tempo, www.tempointeraktif.com,<diakses 25 November 2006>
- Remarks by Rex W. Tillerson, President, ExxonMobil Corporation*, (2004).BIEM Conference. Jakarta, Indonesia. <diakses 13 Maret 2007>
- Retno Sulistyowati. *Pemerintah tak akan intervensi kasus exxon cepu*, (2004) <http://www.tempointeraktif.com/>. <diakses 10 Februari 2007>
- Sumur Cepu Disoal Dijual Pertamina ke ExxonMobil*. (2006).Jawa Pos. www.jawapos.com.<diakses 16 Maret 2006>
- Suryani Ika Sari. (2005). *Aburizal: Kesepakatan Pertamina-Exxon terlalu kecil*.<http://www.tempointeraktif.com/>.<diakses 22 Februari 2007>

The National Security Strategy. (2006). White House.
<http://www.whitehouse.gov/ADN/press/2006/ansu060617a01.htm> <diakses 17 Maret 2007>

Tolak Exxon, Pemuda Islam Solo Konvoi ke Cepu. (2006). www.tempointeraktif.com. <diakses 19 Maret 2006>

Warga Bojonegoro Demo Menuntut Exxon, (2006). www.tempointeraktif.com. <diakses 20 Maret 2006>

Multinational Corporations. (2000). www.cafod.org. <diakses 10 Februari 2007>

Indonesia (2007). www.wikinfo.org/upload/c/c9/Indonesia_flag_medium.png. <diakses pada 17 Januari 2007>

www.cqu.edu.au/unions/rosa/flag_png.gif (2006).. <diakses pada 17 Januari 2007>

www.exxonmobil.com, (2006). *ExxonMobil and Pertamina Sign Joint Operating Agreement for Cepu Block*, 15 Maret 2006

Surat Pembaca. (2007) www.pemkabbojonegoro.co.id. <diakses 19 Mei 2007>

Berita Blok Cepu. (2006). www.indonesische-botschaft.de/web-versi-indonesia/in/kbri_berlin/antara/maret/24a.rtf. <diakses 30 Maret 2006>



Public Information and Policy Research

ExxonMobil supports organizations that research significant domestic and foreign policy issues and promote informed discussion on issues of direct relevance to business and the company's ongoing operations. In 2002, worldwide contributions for Public Information and Policy Research totaled \$5.6 million, with \$5.1 million focused within the United States.

We support programs that increase the United States' knowledge of the world and shape U.S. foreign policy. We fund the Council on Foreign Relations to assist them in constructive discussions both in private and in public, and to publish *Foreign Affairs*, a journal on global issues. To increase the understanding by the people of the United States about societies and cultures of the world, we support a variety of organizations and programs focused on both cultural affairs and public policy programs. The Asia Society and the Corporate Council on Africa are currently funded by ExxonMobil.

Organizations that are dedicated to research on free market solutions to public policy problems receive support from ExxonMobil. The American Enterprise Institute for Public Policy Research and the Competitive Enterprise Institute, organizations dedicated to strengthening the foundations of freedom and to the principles of free enterprise, receive support from ExxonMobil.

Through various memberships and affiliations, we support the promotion of business views and solutions on a wide range of global economic and business policy issues. We fund the United States Council for International Business, International Chamber of Commerce and the National Foreign Trade Council to obtain business-critical information about international policy and regulatory issues.

Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, Grand Rapids, Michigan	30,000
Advancement of Sound Science Center, Potomac, Maryland	10,000
Advertising Council, Inc., New York, N.Y.	20,000
AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington, D.C.	25,000
Africa Society, Washington, D.C.	25,000
American Council for Capital Formation Center for Policy Research*, Washington, D.C.	
Climate Change Activities	199,523
Washington Diplomatic Outreach Activities	100,000
American Council on Germany, Inc., New York, N.Y.	
John J. McCloy Award Dinner*	25,000
General Support	10,000
American Council on Science and Health, New York, N.Y.	10,000
American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C.	
Annual Dinner*	5,000
General Operating Support	225,000
Project Support	25,000

American Legislative Exchange Council, Washington, D.C.	
Annual Conference*	50,000
General Operating Support	30,000
General Operating Support*	80,000
Membership*	5,000
Project Support*	25,000
Others*, each under \$5,000	3,200
Subtotal	193,200
Americas Society, Inc.*, New York, N.Y.	
Annual Spring Party	5,000
Annapolis Center for Environmental Quality, Inc., Maryland	
Children's Asthma*	50,000
General Support	70,000
Arab American Institute*, Washington, D.C.	
Kahlil Gibran Awards	25,000
Asia Society*, Washington, D.C.	
Congressional Forum/Dinner	45,000
DC Metro and NY	20,000
Aspen Institute, Inc.*, Washington, D.C.	10,000
Atlantic Council of the United States, Washington, D.C.	
Energy Program*	10,000
General Support	10,000
Atlantic Legal Foundation, New York, N.Y.	5,000
Atlas Economic Research Foundation, Fairfax, Virginia	50,000
Baylor University School of Law, Waco, Texas	5,000
Brookings Institution, Washington, D.C.	50,000
Business Council for International Understanding*, New York, N.Y.	
Training in Commercial Diplomacy	25,000
Capital Research Center, Washington, D.C.	
Green Watch Project	25,000
Cato Institute, Washington, D.C.	
25th Anniversary Gala*	5,000
General Support	25,000
Center for American and International Law, Dallas, Texas	
Annual Luncheon*	2,500
General Operating Support	23,100
Center for Strategic and International Studies, Inc., Washington, D.C.	145,000
Central and East European Law Initiative Institute, Washington, D.C.	
Judge and Lawyer Training Program (\$100k: 2002-2005)	25,000
Chapman University, Orange, California	
Law and Organizational Economics Center	20,000
Chemical Education Foundation, Arlington, Virginia	
Product Stewardship Bulletins	25,000
China Business Forum, Washington, D.C.	25,000
Clay Minerals Society, Boulder, Colorado	
Annual Meeting	5,000
Columbia University, Middle East Institute, New York, N.Y.	
Middle East Institute	10,000
Committee for a Constructive Tomorrow, Washington, D.C.	35,000

Committee for Economic Development, New York, N.Y.	75,000
Competitive Enterprise Institute, Washington, D.C.	
Congressional Briefing Program	50,000
General Operating Support	125,000
General Operating Support*	140,000
Legal Activities*	60,000
Project Support	30,000
Subtotal	405,000
Conference Board, Inc., New York, N.Y.	
Exchange Rate Project (\$50k: 2001-2002)	25,000
Congressional Black Caucus Foundation, Inc.*, Washington, D.C.	
Annual Legislative Conference Dinner	25,000
Consumer Alert, Inc., Washington, D.C.	10,000
Corporate Council on Africa*, Washington, D.C.	10,000
Council of State Governments*	
Lexington, Kentucky	5,000
Washington, D.C.	5,000
Council on Foreign Relations*, New York, N.Y.	
Annual Subscription to the Corporate Program	50,000
CPR Institute for Dispute Resolution, Inc.*, New York, N.Y.	6,000
Duke University, Durham, North Carolina	
Center for Environmental Solutions	45,000
East West Institute, New York, N.Y.	10,000
Environmental Law Institute*, Washington, D.C.	
Eli Award Dinner	17,500
Federalist Society for Law and Public Policy Studies, Washington, D.C.	15,000
Florida International University, Miami	15,000
Foreign Policy Association*, New York, N.Y.	75,000
Foundation for American Communications, Pasadena, California	
25th Anniversary Gala	25,000
Science Journalism Program*	150,000
Foundation for Public Affairs*, Washington, D.C.	5,000
Foundation for Research on Economics and the Environment, Bozeman, Montana	30,000
Foundation for the Center for Energy, Marine Transportation and Public Policy at Columbia University*, New York, N.Y.	
General Support (\$500k: 1999-2003)	200,000
Frontiers of Freedom, Fairfax, Virginia	
Center for Sound Science and Public Policy	100,000
Global Climate Change Outreach Activities	97,000
Global Climate Change Science Projects	35,000
George C. Marshall Foundation, Washington, D.C.	
Awards Dinner*	10,000
Global Climate Change Program	80,000
George Mason University, Fairfax, Virginia	
Law & Economics Center	20,000

George Washington University, D.C.	
Global Grassroots Education Program	25,000
Georgetown University, Washington, D.C.	
Center Contemporary Arabic Studies	30,000
Landegger Program	10,000
Gordon Research Conferences, Kingston, Rhode Island	
Organic Geochemists	5,000
Heartland Institute, Chicago, Illinois	15,000
Henry L. Stimson Center, Washington, D.C.	10,000
Heritage Foundation, Washington, D.C.	75,000
Hoover Institution, Stanford, California	20,000
Houston Forum*, Texas	6,500
Houston Image Group*, Texas	
An Evening with President Jiang Zemin Gala	25,000
Houston Junior Chamber of Commerce Foundation, Inc.*, Texas	
Consular Ball	10,000
Independent Institute, Inc., Oakland, California	10,000
Independent Women's Forum, Arlington, Virginia	5,000
Institute for Civil Justice*, Santa Monica, California	75,000
Institute for Energy Research, Houston, Texas	30,000
Institute for Policy Innovation, Lewisville, Texas	7,500
Institute for the Study of Earth and Man*, Dallas, Texas	
General Operating Support	10,000
Hedberg Award	5,000
International Association of Defense Counsel Foundation, Chicago, Illinois	
National Jury Trial Innovations Project	10,000
International Republican Institute, Washington, D.C.	10,000
John F. Kennedy School of Government, Harvard University*, Cambridge, Massachusetts	
Caspian Studies Program and Azerbaijan Initiative	50,000
Johns Hopkins University, School for Advanced International Studies, Washington, D.C.	60,000
Joint Center for Political and Economic Studies*, Washington, D.C.	
Annual Awards Dinner	15,000
Landmark Legal Foundation, Kansas City, Missouri	
Environmental Accountability Initiative	10,000
Legal Aid Society of the District of Columbia*, Washington, D.C.	
Servant of Justice Dinner	5,000
Lexington Institute, Arlington, Virginia	10,000
Mackinac Center, Midland, Michigan	10,000
Manhattan Institute for Policy Research, New York, N.Y.	65,000
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge	
Energy Policy Studies	90,000
Media Institute, Washington, D.C.	20,000
Mentor Group, Boston, Massachusetts	
Court Forum	30,000
Mexican Cultural Institute, Washington, D.C.	5,000

Middle East Institute*, Washington, D.C.	
Conference*	10,000
General Support	40,000
Middle East Policy Council, Washington, D.C.	17,500
Mosaic Foundation*, McLean, Virginia	
Mosaic Fundraising Gala	100,000
National Academy of Sciences, Washington, D.C.	
STL Panel	50,000
National Association of Neighborhoods, Washington, D.C.	10,000
National Black Caucus of State Legislators*, Washington, D.C.	10,000
National Black Chamber of Commerce, Washington, D.C.	25,000
National Bureau of Asian Research*, Seattle, Washington	25,000
National Bureau of Economic Research*, Cambridge, Massachusetts	50,000
National Center for Policy Analysis, Dallas, Texas	30,000
National Center for Public Policy Research, Washington, D.C.	
Educational Activities*	30,000
General Support	15,000
National Center for State Courts, Williamsburg, Virginia	12,500
National Conference of State Legislatures Foundation*, Denver, Colorado	
National Convention	25,000
National Council on US-Arab Relations*, Washington, D.C.	
Annual Conference	20,000
National Democratic Institute for International Affairs, Washington, D.C.	10,000
National Foreign Trade Council*, Washington, D.C.	
World Trade Dinner	10,000
National Judicial College, Reno, Nevada	45,000
National Legal Center for the Public Interest, Washington, D.C.	
Gauer Lecture*	8,000
General Operating Support	25,000
National Policy Association*, Washington, D.C.	40,000
Pacific Legal Foundation, Sacramento, California	15,000
Pacific Research Institute for Public Policy, San Francisco, California	
General Operating Support	20,000
Index of Leading Indicators Project	25,000
Play Soccer, Princeton, New Jersey	20,000
Political Economy Research Center, Bozeman, Montana	15,000
Reason Foundation, Los Angeles, California	50,000
Southern Methodist University Law School Foundation, Dallas, Texas	10,000
Southwestern Legal Foundation*, Richardson, Texas	
Institute for Energy Law	9,500
Stanford University, California	
Energy Policy Studies	90,000
Tax Council Policy Institute, Washington, D.C.	10,000
Tax Research Association of Houston and Harris County*, Texas	12,000
Third Millennium Advocates for the Future, Inc., New York, N.Y.	5,000
Transparency International US*, Washington, D.C.	50,000
TTARA Research Foundation*, Austin, Texas	10,000
United States-Indonesia Society*, Washington, D.C.	50,000
University of Denver, Colorado	

China Program	20,000
University of Houston Law Center, Texas	
Annual Gala*	10,000
General Operating Support (\$100k: 2000-2003)	25,000
Institute for Energy, Law and Enterprise*	5,000
University of Miami, North/South Center, Coral Gables, Florida	5,000
University of North Carolina at Chapel Hill	45,000
University of Texas Law School Foundation, Austin	10,000
University of Virginia - Center for Politics*, Charlottesville	5,050
Urban Institute, Washington, D.C.	
Chair in Public Finance Policy (\$500k: 1998-2002)	100,000
Washington Legal Foundation, D.C.	30,000
Washington University, St. Louis, Missouri	
Weidenbaum Center	50,000
Women In Government*, Washington, D.C.	5,000
Woodrow Wilson International Center for Scholars*, Washington, D.C.	
Houston Annual Dinner	10,000
Special Contribution	100,000
Wilson Alliance	15,000
World Affairs Council of Greater Dallas*, Texas	
50th Anniversary Dinner	25,000
World Affairs Councils of America*, Washington, D.C.	
Event Sponsorship	10,000
National Board	6,000
World Press Institute, St. Paul, Minnesota	20,000
Wyoming Heritage Foundation, Casper	10,000
Exxon Mobil Corporation	
Other contributions*, each under \$5,000	15,250
ExxonMobil Foundation	
Other contributions, each under \$5,000	23,500
Total Public Policy Contributions made through the United States	\$5,507,123
Contributions Benefiting Communities in the United States	\$5,118,123
Contributions Benefiting Countries Outside the U.S. #	488,600
Total Worldwide Public Policy Contributions #	\$5,606,723
Exxon Mobil Corporation*	\$2,418,123
ExxonMobil Foundation	3,188,600
Total Public Information and Policy Research	\$5,606,723

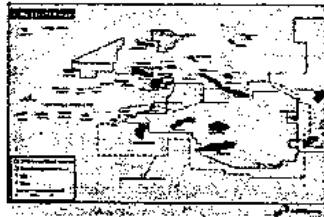
Grants were made by ExxonMobil Foundation except where indicated by:

- Exxon Mobil Corporation

May include contributions to nonprofit organizations, direct spending for community-serving projects, and "social bonus" projects required under agreement with host governments.



**PRODUCTION SHARING CONTRACT
(PSC)
BLOK CEPU**



Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan
di Wilayah DKI Jakarta & Sekitarnya
Rabu, 26 April 2006
Universitas Indonesia

Oleh
Iin Arifin Takhyan
Wakil Direktur Utama
PT PERTAMINA (PERSERO)

SPCC
PMI

Arifin Takhyan

SEJARAH PENETAPAN / PENGATURAN KONTRAK PERMINYAKAN  **PERTAMINA**

- Industri perminyakan di Indonesia dimulai seabad lalu pada 1885 dengan penemuan lapangan Telaga Said di Sumatera Utara, diikuti penemuan di Ledok di Jawa Timur, Muara Enim di Sumatera Utara dan Sanga-sanga di Kalimantan Timur. Pemegang konsesi akan mendapatkan hak untuk menambang sumber-sumber mineral pada area yang ditentukan sebagai konsesi, kemudian mempunyai kontrol langsung pada sumber-sumber tersebut.
- Setelah perang dunia ke II, sekitar 2% dari produksi minyak dunia berasal dari Indonesia, produksi utamanya berasal dari reservoir yang dangkal pada kedalaman 1200 meter dan kedalaman rata-rata hanya 550 meter.
- Pada 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaan, dan mengumumkan bahwa semua kekayaan alam termasuk sumber-sumber minyak adalah milik rakyat Indonesia, sehingga semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus dikontrol, dan memberikan keuntungan maksimum bagi rakyat Indonesia.



- Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 44 prp/1960 dan Undang-Undang 8/1971 yang mana memberi PERTAMINA, sebagai Perusahaan Minyak Negara, untuk melakukan eksplorasi dan produksi sumber-sumber minyak di seluruh wilayah Indonesia
- PERTAMINA sebagai perusahaan negara diben kuasa untuk melakukan kerjasama dengan kontraktor asing guna mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak yang ada di wilayah Indonesia. Kontrak konsesi diubah dalam bentuk kontrak bagai hasil (*Production Sharing Contract/PSC*).
- Yang menjadi filosofi dilaksanakannya PSC tersebut pada prinsipnya adalah sebagai berikut
 - Kepemilikan Resources tetap ada pada Negara
 - Manajemen berada di tangan Pemerintah Cq BPMIGAS
 - Investor bertindak hanya sebagai operator (dalam hal Blok Cepu adalah PERTAMINA dan ExxonMobil dalam Joint Operating Agreement (JOA))
 - Menyediakan dana
 - Menyediakan teknologi
 - Menanggung resiko :
 - » Jika eksplorasi gagal, resiko 100% ditanggung kontraktor, Pemerintah tidak menanggung resiko apapun.
 - » Jika berhasil dan komersial kontraktor berhak mendapatkan pengembalian biaya (Cost Recovery) namun semua aset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara, tetapi PPh dan Bea Masuk ditanggung negara.
 - » Bagi hasil setelah PPh 44% untuk Pemerintah 85% dan Kontraktor 15%.
- UU No. 8 Thn 1971 telah diubah dengan UU No. 22 Thn 2001, dimana PSC dalam UU No. 22 Thn 2001 mempunyai filosofi yang sama dengan UU No. 8 Thn 1971 kecuali Peran PERTAMINA selaku Pemegang manajemen PSC yang sekarang beralih kepada BPMIGAS dan Penawaran dan Perundingan WK beralih kepada MESDM
- Sejak 1966, konsep Production Sharing Contract (PSC) sudah menjadi bentuk prinsip pada kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak untuk eksplorasi dan produksi perminyakan di Indonesia; dan dilakukan pengembangan-pengembangan PSC seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri minyak yang terjadi di dunia.

IT. 1. 2

PERKEMBANGAN PRODUCTION SHARING CONTRACT



Generasi Pertama (1965-1975)

- 40% cost recovery cap pada pendapatan total diberlakukan pertahun
- Perbandingan bagi hasil PERTAMINA 65% : Kontraktor 35% setelah Pendapatan Total dikurangi 40% Cost Recovery.
- Domestic Market Obligation (DMO) 25% dengan harga minyak pada harga minyak US\$0.20/bbl

Generasi Kedua (1976-1988)

- Tidak ada cost recovery cap yang diterapkan, dan cost recovery berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar akunting.
- Capital expenditures didepresiasi lebih dari 7 tahun dengan double declining balance, dan non-capital cost termasuk intangibles dapat dijadikan pengeluaran.
- Setelah cost recovery, pembagian share untuk minyak adalah 65.91% PERTAMINA : 34.09% Kontraktor. Untuk gas, 31.82% PERTAMINA : 68.18% Kontraktor.
- Pajak perusahaan sebesar 56% (terdiri dari 45% pajak pendapatan dan 20% pada sisa sebagai pajak dividen), pembagian share sebesar untuk minyak 85% : 15% dan untuk gas 70% : 30%. Kemudian UU Pajak merubah pajak menjadi 48%. Untuk mengamankan pembagian dari bagian bersih, pembagian sebelum pajak secara konsekuen di sesuaikan menjadi 71.15%/28.85% untuk minyak dan 42.31%/57.69% untuk gas.
- Untuk lapangan-lapangan baru, kontraktor diberi kredit investasi, 20% pada capital expenditures untuk fasilitas produksi, dan harga export penuh untuk DMO selama 5 tahun kalender produksi.

Generasi Ketiga (1988-Sekarang)

- First Tranche Petroleum (FTP) 20% dari volume produksi yang diambil dahulu sebelum pengembalian biaya operasional, pembagian antara PERTAMINA dan Kontraktor menurut sistem pembagian diberikan dalam PSC.
- Meningkatkan pembagian Kontraktor pada daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi seperti cadangan pada batuan preTertiary, Enhanced Oil Recovery (EOR) pada cadangan Tersier; lapangan marginal dan laut dalam. Keutamaan ini diambil dalam empat paket insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah. (*Tabel Paket Insentif terlampir*)
- Harga DMO mempunyai variasi dalam prosentase harga export. Diambil dari empat paket insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- Kredit investasi selanjutnya akan diberikan dengan memperhatikan pendapatan Pemerintah tidak kurang dari 49% dari pendapatan.
- Deregulasi pada procedure procurement material dan servis oleh kontraktor.

II 1-2

Pengembangan pada Paket Insentif Perminyakan



Elemen	Paket Insentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Insentif Kedua (Februari 1989)	Paket Insentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Insentif Keempat* (Desember 1993)
- Kredit investasi	Kredit investasi mencapai 17% pada biaya Investasi Kapital	Untuk area laut dalam > dan 600 ft : - 110% (minyak) - 55% (gas)	Area Pengembangan - Cadangan batuan preTertiary=110% untuk minyak dan gas - Kedalaman air 200-1500 m =110% minyak dan gas - Kedalaman air < 1500M = 125% untuk oil dan gas	Tidak diterapkan lagi
- Komersialisasi	Kondisi dimana Pemerintah harus mendapat 49% dari pendapatan kotor tidak berlaku lagi. Jaminan minimum adalah 25% dari pendapatan kotor untuk Pemerintah	Dihapuskan	Dihapuskan	Dihapuskan

Pengembangan pada Paket Insentif Perminyakan



Elemen	Paket Insentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Insentif Kedua (Februari 1989)	Paket Insentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Insentif Keempat* (Desember 1993)
- Harga DMO	10% pada harga export setelah lima tahun pertama	Tidak berubah	15% pada harga export setelah lima tahun pertama	25% pada harga export setelah lima tahun pertama
- First Tranche Petroleum	20% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor	Tidak berubah	Tidak berubah	15% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor

PENGEMBANGAN PADA PAKET INSENTIF PERMINYAKAN		PERTAMINA		
Elemen	Paket Insentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Insentif Kedua (Februari 1989)	Paket Insentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Insentif Keempat (Desember 1993)
Pembagian	Untuk minyak : Batas Produksi : - < 50 MBOPD = 80% : 20% 50-150 MBOPD = 85% : 15% >150 MBOPD = 90% : 10% - Area Konvensional = 85% : 15%	Untuk Minyak : Lap. Marginal dan EOR di penemuan Tertiary : - Area Konvensional = 80% : 20% Batas area = 75% : 25%	Untuk Minyak : - Lapangan yang dikembangkan pada batas area = 80% : 20% - Lapangan yang dikembangkan dalam area dengan kedalaman air > 1500 m = 75% : 25%	Untuk Minyak : 65% : 35% Tanpa kredit investasi
	Untuk Gas: Batas produksi = 70% : 30% Area Konvensional = 70% : 30%	Produksi sedimen pre-Tertiary dan laut dalam (lebih dan 600 ft) : Pembagian incremental sama seperti batas produksi dalam paket Pertama Untuk Gas: Tidak berubah	Untuk Gas: - Lapangan yang dikembangkan pada konvensional area = 80% : 20% - Lapangan yang dikembangkan pada batas area = 60% : 40% - Lapangan yang dikembangkan dalam area dengan kedalaman air > 1500 m = 55% : 45%	Untuk Gas: 60% : 40% Tanpa kredit investasi *) Untuk area Indonesia Timur dan bagian dari Barat Indonesia yang mempunyai kesamaan kondisi geologi dan geografi

Production Sharing Contract Basic Term

PERTAMINA

- PERTAMINA bertanggung jawab atas pengelolaan operasional, tapi kontraktor menanggung semua resiko dan bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan rencana kerja.
- Term dari kontrak adalah 30 tahun, termasuk 6 sampai 10 tahun periode eksplorasi. Jika penemuan komersial minyak tidak terjadi pada akhir periode eksplorasi, secara otomatis kontrak berakhir.
- Kontraktor bebas untuk menjual keluar hak pada cost recovery dan pembagian produksi dan subyek untuk memenuhi DMO.
- Pengembalian Biaya berdasarkan prinsip-prinsip prosedur akunting, dapat dikembalikan dari produksi yang tersedia tanpa batasan volume.
- Pembagian dilakukan pada produksi bukan keuntungan. Bagian Pemerintah/PERTAMINA dan Kontraktor akan dibagi setelah pengurang cost recovery dan pajak.
- Kontraktor dan PERTAMINA berhak untuk "first take" (First Tranche Petroleum / FTP). Sesuai dengan sesuai besarnya Participating interest.
- Kontraktor Asing diwajibkan untuk memberikan Participating interest sebesar 10% kepada Perusahaan Nasional.

III-1

Production Sharing Contract Derivatives



Ada tiga turunan (derivatives) pengaturan Kontrak PSC yang diterapkan pada area PERTAMINA yaitu :

I. PSC - Joint Operating Agreement (JOA) / Joint Operating Body (JOB)

- Bentuk PSC – JOA / JOB diterapkan pada area prospek yang sudah eksplorasi.
- Presentase saham pada suatu Wilayah Kerja yang dikerjasamakan secara PSC-JOA/JOB tergantung pada hasil negosiasi antara PERTAMINA dan Kontraktor.
- Bagian Kontraktor sesuai dengan isi kontrak pada PSC.
- Kontribusi dari cash call tahunan PERTAMINA dimulai setelah pengeluaran kontraktor sesuai dengan PERTAMINA sunk cost atau setelah tiga tahun pertama pada kontrak.
- Jika Kontraktor membawa PERTAMINA dalam usaha bersama eksplorasi dan atau biaya pengembangan, dan sebaiknya PERTAMINA memilih skema prefinancing, presentase untuk uplift dalam pengembalian biaya yang diijinkan oleh PERTAMINA
- PERTAMINA sebagai operator dibantu Kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang bertanggung jawab kepada, dan disupervisi oleh Joint Operating Committee (JOC)
- PERTAMINA dan Kontraktor membentuk Operating Committee yang memiliki wewenang dalam menyetujui Rencana Kerja & Biaya dan mengendalikan peraturan.

Production Sharing Contract Derivatives



II. Technical Assistance Contract (TAC)

- Bentuk dari PSC TAC, ditujukan untuk lapangan yang telah dieksplorasi, namun dengan kondisi antara lain lapangan sudah tua, tidak dalam produksi, tidak ekonomis.
- Tujuan utama untuk mempercepat peningkatan produksi dan eksploitasi pada cadangan-cadangan minyak. Ini juga termasuk kelanjutan produksi minyak mentah PERTAMINA oleh Kontraktor, yang mana bukan merupakan subjek pembagian dalam kontrak.
- Pembagian minyak adalah minyak diluar dari minyak mentah utama.
- Biaya-biaya peralatan dan servis untuk minyak mentah yang utama akan dijelaskan pada bagian biaya operasional.
- Kontraktor akan mendapat biaya operasi maksimum 65% pertahun dari minyak mentah yang dihasilkan
- Dalam kontrak PSC TAC, kontraktor bertindak sebagai operator.
- Kontraktor harus memberikan bantuan teknik untuk operasi peminyakan dan bertanggung jawab kepada PERTAMINA untuk pelaksanaan operasi

Production Sharing Contract Derivatives



III Enhanced Oil Recovery (EOR)

- Adalah bentuk dari Derivative PSC yang meliputi lapangan produksi dan ditujukan pada proyek untuk merehabilitasi sumur-sumur yang ada, studi engineering, injectivity test, dan pilot flood.
- PERTAMINA memegang maksimum 50% kepemilikan saham. Kepemilikan saham oleh Kontraktor merupakan subyek untuk dibagi setelah pengurangan cost recovery dan pajak.
- Kontraktor bergabung dan membantu PERTAMINA pada pengembangan cadangan minyak potensial dengan melakukan operasi Enhanced Oil Recovery, dalam bentuk Joint Operating Body (JOB). Badan tersebut bertanggung jawab kepada, dan disupervisi oleh Joint Operating Committee (JOC).
- PERTAMINA dan Kontraktor membentuk anggota dari Operating Committee. Operating Committee menetapkan peraturan, program, biaya yang mana operasi EOR akan dilaksanakan.
- Biaya aktivitas hilir yang muncul oleh PERTAMINA, dapat dibebankan kepada operasi EOR pada basis pro-rata.
- Tujuan utama untuk meningkatkan produksi minyak dengan melakukan operasi Enhanced Oil Recovery (EOR).
- Peningkatan produksi minyak di tentukan pada zona produksi dan disetujui sebelum penandatanganan kontrak yang disebut "incremental oil". Dan ini menjadi subyek untuk dibagi antara PERTAMINA dan Kontraktor.

Kronologi Blok Cepu hingga akhirnya tercapai kesepakatan *Joint Operation* antara PERTAMINA dan Exxon Mobil



Pemerintah sangat berkepentingan atas beroperasinya Blok Cepu, mengingat kandungan minyak dan gas yang ada di areal tersebut serta permasalahan energi nasional yang tengah dihadapi pemerintah. Namun kenyataannya sejak ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) Juni 2004 antara PERTAMINA dan ExxonMobil, Direksi PERTAMINA belum selesai menindaklanjuti perundingan dengan pihak ExxonMobil sebagai pemegang Technical Assistance Contract (TAC) atas Blok Cepu. Atas dasar itu pemerintah menempuh langkah sebagai berikut:

- 26 November 2004: Menko Perekonomian mengeluarkan surat No: S-54/M.EKON/11/2004 kepada Dirut PERTAMINA, mengenai arahan Presiden untuk memulai kembali perundingan Blok Cepu dan menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama.
- 25 Februari 2005: Surat Menteri Sekretaris Negara No: R.22/M.Sesneg/2/2005 ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, Dirut PERTAMINA, mengenai arahan Presiden agar PT PERTAMINA memulai perundingan Blok Cepu untuk mendapatkan nilai maksimum bagi pendapatan negara.
- Pada tanggal 29 Maret 2005 Menteri Negara BUMN menerbitkan Surat keputusan No: Kep-16/MBU/2005 tentang "Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Pemasalahan antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA dan ExxonMobil Terkait dengan Blok Cepu". Pembentukan tim tersebut adalah langkah yang ditempuh untuk mendorong dimulainya kembali perundingan.

- Tim Negosiasi beranggotakan unsur pemerintah dari departemen terkait, serta unsur PERTAMINA yang diwakili komisaris dan direksi. Keterlibatan unsur pemerintah dalam Tim Negosiasi adalah untuk menjamin kepentingan Negara terakomodasi sepenuhnya dalam penyelesaian Blok Cepu. Tim Negosiasi bertindak untuk dan atas nama PERTAMINA dalam perundingan dengan Pihak ExxonMobil.
- Tim Negosiasi telah melakukan sebanyak 31 kali pertemuan. Yaitu 12 kali pertemuan koordinasi dengan Komite Pengarah (Menko Perekonomian, Meneg BUMN, Menteri ESDM), termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan dengan Presiden dan 3 kali pertemuan dengan Wakil Presiden, 8 kali pertemuan internal, dan 11 kali pertemuan dengan pihak ExxonMobil. Hasil kesepakatan antara Tim Negosiasi dan ExxonMobil yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah, dituangkan dalam 'Memorandum of Understanding' yang ditandatangani pada 25 Juni 2005, atau yang disebut MoU 2005.
- Berdasarkan MoU 2005 pihak terkait, yaitu BP Migas atas nama Pemerintah, PERTAMINA, dan ExxonMobil mencapai kesepakatan pengelolaan Blok Cepu dalam bentuk KKS dengan jangka waktu 30 tahun. Pengoperasian Blok Cepu telah disepakati antara PERTAMINA dan ExxonMobil dalam bentuk *Joint Operation*. Pada tanggal 15 Maret 2006 *Joint Operating Agreement (JOA)* dan *Cepu Organization Agreement* ditandatangani.

Legalitas Pengalihan TAC Blok Cepu dari Humpuss Patragas ke ExxonMobil Cepu

- TAC Cepu ditandatangani pada 3 Agustus 1990 antara PERTAMINA dan Humpuss Patra Gas (HPG), untuk jangka waktu 20 tahun. Pada Mei 1996, perusahaan Australia Ampolex Pte. Ltd mendatangi perjanjian *farm-in* untuk memperoleh 49% dari *interest* Kontraktor di TAC Cepu dari Humpuss PG. Transfer ini kemudian disetujui sepenuhnya oleh PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan dan Pemerintah RI.
- Pada Desember 1996 Mobil Corporation mengakuisisi Ampolex untuk portfolio globalnya sehingga otomatis Mobil mempunyai *interest* di blok Cepu sebesar 49%. Di tahun 1999, Exxon Corporation dan Mobil Corporation melakukan merger dan membentuk ExxonMobil Corporation.
- Pada Juni 2000, Mobil Cepu Ltd, anak perusahaan ExxonMobil, memperoleh sisa 51% *interest* Kontraktor milik HPG dan mengambil alih hak sebagai operator untuk TAC Cepu dengan persetujuan dari PERTAMINA dan Pemerintah RI. Seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga legal dan sah secara hukum, baik hukum Indonesia maupun Internasional.

II.1.2

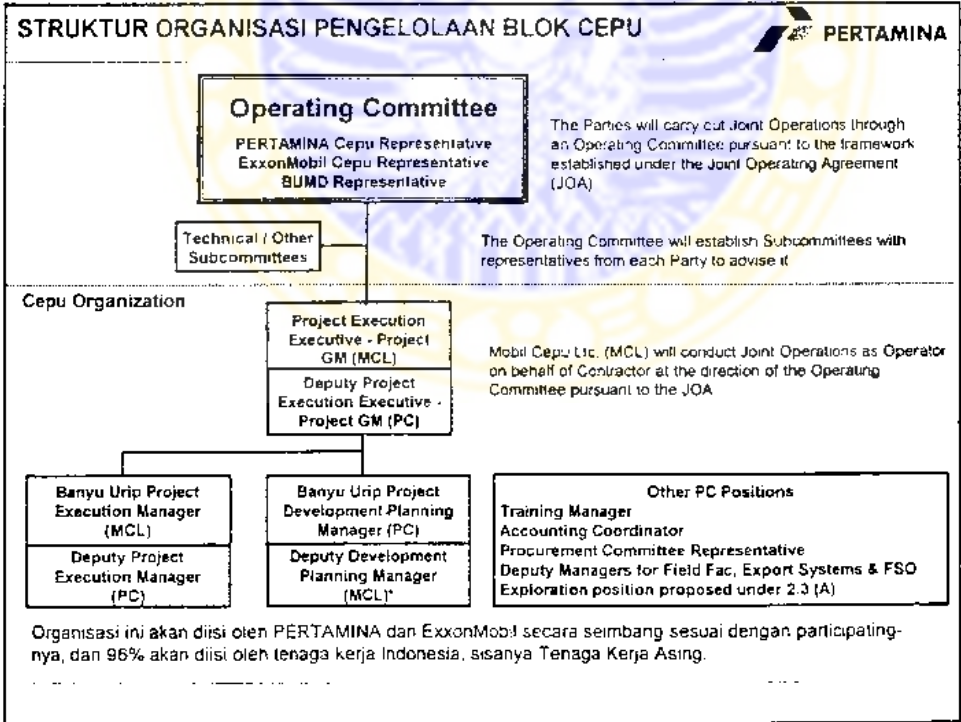
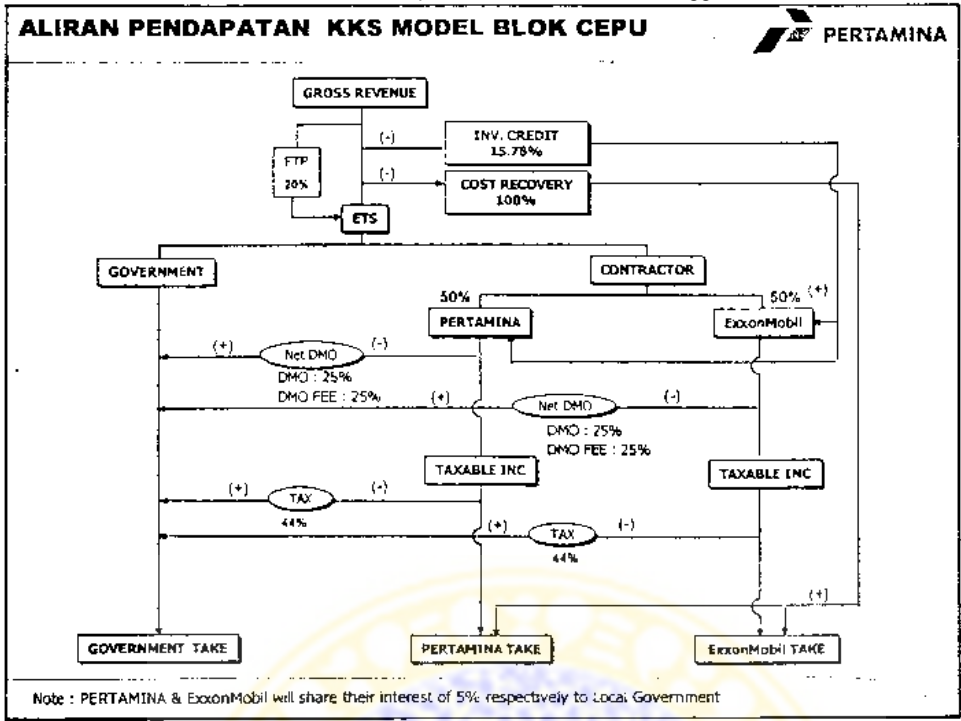
081 33 edwin
7.22 0922

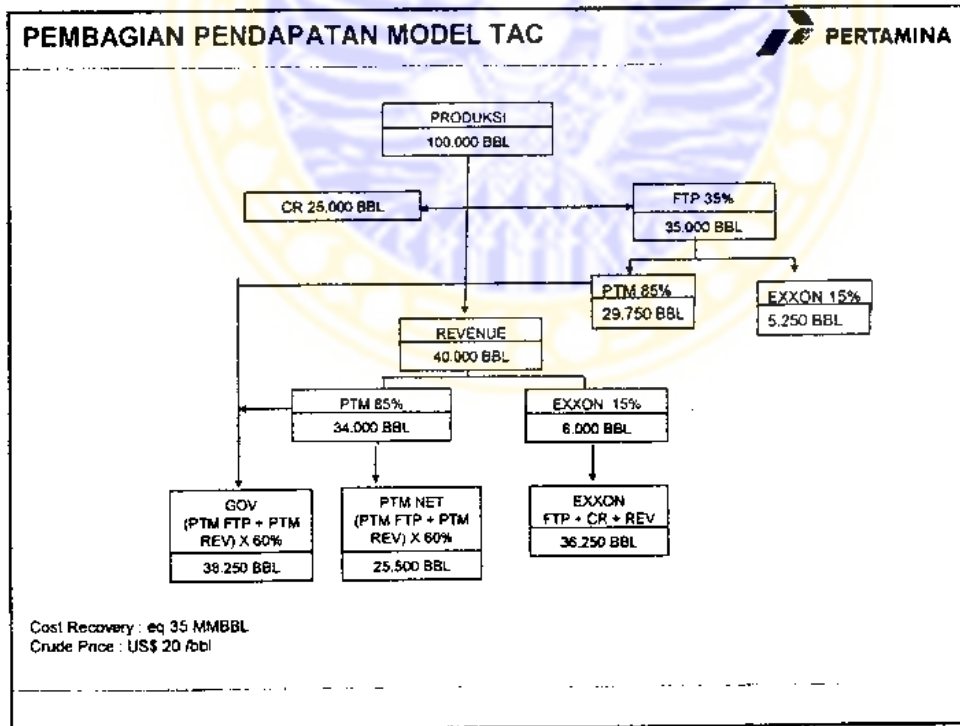
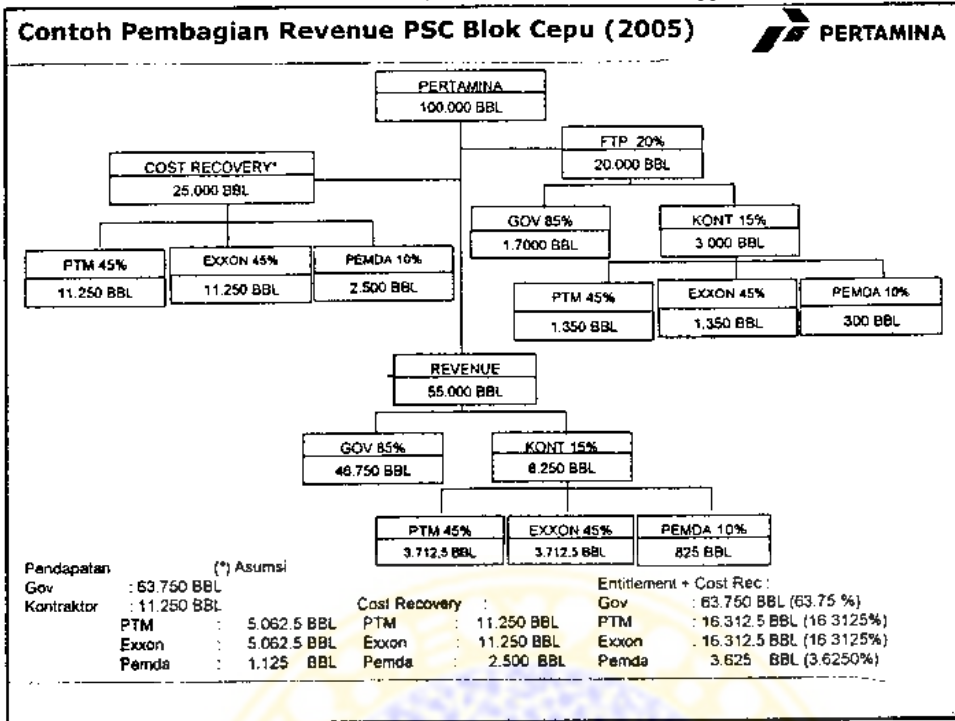
BATASAN & KONDISI KONTRAK KERJASAMA BLOK CEPU

- > **Jangka Waktu** : 30 tahun
- > **Pemegang Interest Gov't** : PERTAMINA 45%, EM 45% & Local 10%
- > **Split Minyak** : Berdasarkan Sliding Scale Harga Minyak.
- > **Gas** : Pemerintah : 65% & Contractor : 35% (After tax).
- > **FTP** : 20%
- > **DMO Volume** : 25%
- > **DMO fee** : 25% dari hrg pasar (DMO holiday 5 tahun).
- > **Investment Credit** : 15.78% (Oil & Gas).
- > **Tax** : 44%

FORMULASI PEMBAGIAN MINYAK KKS BLOK CEPU

Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calendar Year		PEMERINTAH	CONTRACTOR
Greater than or equal to	Less than		
0	35	70%	30%
35	40	75%	25%
40	45	80%	20%
45	-	85%	15%





Potensi Blok Cepu dan keuntungan dari Blok Cepu yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia



- Blok Cepu diperkirakan mengandung sumber daya minyak bumi sekitar 600 juta barel dan sumber daya gas bumi sekitar 1,7 triliun kaki kubik. Terdiri atas beberapa lapangan, antara lain Banyu Urip, Alas Dara, Kemuning, Jambaran, Sukowati, dan Cendana.
- Pengembangan Lapangan Minyak Banyu Urip akan menambah produksi minyak hingga 165 ribu barel per hari pada produksi puncaknya akan menambah kapasitas produksi minyak mentah Indonesia saat ini hingga 20%.
- Akan meningkatkan iklim investasi.
- Pengembangan Proyek Cepu dan produksinya akan berdampak positif bagi industri lainnya dan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan hasil ekonomi, lapangan kerja, dan program-program pengembangan masyarakat serta akan menimbulkan *multiplier effect*.

III, 2



TERIMA KASIH